AI dan Masa Depan Pemilu

Antara Efisiensi, Manipulasi, dan Kepercayaan Publik



1 EFISIENSI

- Layanan pemilih lebih responsif
- Analisis logistik dan laporan
- Akses informasi yang inklusif

2 RISIKO MANIPULASI

- Disinformasi dan deepfake
- Microtargeting tanpa transparansi
- Bias, bot, dan kebocoran data

3 MENJAGA KEPERCAYAAN

- Label konten sintetis
- Audit dan pengawasan manusia
- Privasi serta jalur koreksi

AI membantu demokrasi bila prosesnya terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh: Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD
www.rudyct.com/cv.pdf
IBM-ASMI | RudyCT Academic Series

AI dan Masa Depan Pemilu: Antara Efisiensi, Manipulasi, dan Kepercayaan Publik

Artikel Akademik

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD
www.rudyct.com/cv.pdf

IBM-ASMI | RudyCT Academic Series

Abstrak

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pemilu menghadirkan paradoks demokratis. Analitik data, otomatisasi administrasi, penerjemahan, deteksi anomali, dan layanan informasi dapat memperluas akses serta meningkatkan ketepatan kerja penyelenggara dan peserta pemilu. Pada saat yang sama, sistem rekomendasi, pemrofilan pemilih, produksi konten sintetis, bot, dan distribusi pesan yang sangat terarah dapat mengaburkan batas antara persuasi yang sah dan manipulasi. Dampak politik AI tidak ditentukan oleh kecanggihan model semata, melainkan oleh tujuan penggunaan, struktur kepemilikan data, desain platform, kapasitas pengawasan, serta hak warga untuk memperoleh informasi, mengajukan keberatan, dan meminta koreksi. Artikel konseptual ini memetakan penggunaan AI sepanjang siklus pemilu, menguraikan manfaat dan risikonya, dan menempatkan kepercayaan publik sebagai hasil dari integritas proses yang dapat diperiksa. Dengan konteks Indonesia—negara kepulauan, masyarakat majemuk, ruang digital yang beragam bahasa, dan kompetisi elektoral berskala besar—artikel mengusulkan tata kelola berlapis: transparansi penggunaan AI, pelabelan konten sintetis yang efektif, audit independen, perlindungan data, keterbukaan iklan politik, mekanisme respons cepat yang proporsional, literasi publik, dan kendali manusia pada keputusan berdampak tinggi. Argumen utamanya ialah AI dapat membantu pemilu menjadi lebih efisien hanya jika efisiensi tunduk pada kesetaraan politik, kebebasan berekspresi, akuntabilitas, dan kemampuan publik memercayai bukti. Teknologi tidak dapat menggantikan legitimasi; legitimasi dibangun melalui prosedur yang adil, alasan keputusan yang dapat dijelaskan, dan koreksi ketika terjadi kesalahan.

Kata Kunci

kecerdasan buatan; pemilu; demokrasi; kampanye digital; disinformasi; deepfake; perlindungan data; integritas pemilu; kepercayaan publik; tata kelola algoritmik

Pendahuluan

Pemilu adalah proses politik yang sekaligus bersifat administratif, komunikatif, dan simbolik. Ia mengubah pilihan individual menjadi mandat kolektif melalui aturan yang dikenal, kompetisi yang terbuka, kebebasan warga, penghitungan yang dapat diuji, dan penerimaan atas hasil yang sah. Karena itu, kualitas pemilu tidak cukup diukur dari kecepatan penghitungan atau jumlah pemilih yang

terlayani. Pemilu juga harus memungkinkan warga mengenali pilihan, menilai klaim, menyampaikan aspirasi tanpa intimidasi, dan percaya bahwa suara mereka diperlakukan setara. Teknologi digital kini hadir pada hampir seluruh lapisan tersebut. AI mempercepat sejumlah tugas dan mengubah cara informasi dibuat, disaring, disebarkan, serta diterima.

Istilah AI dalam artikel ini mencakup beragam sistem: pembelajaran mesin untuk menemukan pola, pemrosesan bahasa alami untuk mengolah teks dan percakapan, sistem rekomendasi untuk mengurutkan konten, pengenalan gambar dan suara, serta AI generatif yang menghasilkan teks, gambar, audio, dan video. Istilah tersebut bukan satu benda tunggal, dan risikonya berbeda. Perangkat untuk menerjemahkan pengumuman pemilu tidak memiliki profil risiko yang sama dengan sistem yang membuat profil psikologis pemilih atau menghasilkan rekaman palsu seorang kandidat. Pembicaraan yang hanya menyebut "AI" tanpa menjelaskan fungsi, data, pengguna, dan akibatnya akan menghasilkan regulasi yang terlalu luas untuk kegiatan berisiko rendah tetapi terlalu lemah bagi penggunaan yang memengaruhi hak politik.

Artikel ini bersifat analitis-konseptual dan sintesis literatur; ia tidak menyajikan survei baru atau klaim kausal tentang perubahan pilihan pemilih Indonesia akibat AI. Pembedaan ini penting. Keberadaan konten sintetis dalam kampanye tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa konten tersebut mengubah hasil pemilu. Bukti mengenai efek persuasif AI bersifat kontekstual, sementara dampak yang lebih luas—misalnya meningkatnya biaya verifikasi, kebingungan, atau keraguan terhadap bukti—perlu dinilai secara terpisah. Literatur tentang misinformasi menunjukkan bahwa hubungan antara paparan, keyakinan, dan perilaku memilih tidak sederhana (Allcott & Gentzkow, 2017; Tucker et al., 2018).

Tesis artikel ini adalah bahwa AI dapat memperbaiki kapasitas pemilu, tetapi hanya bila penggunaan teknologi dirancang untuk melayani hak dan proses demokratis. Efisiensi adalah nilai penting, tetapi bukan nilai yang berdiri sendiri. Sistem yang mengurangi biaya kampanye dengan menyasar kelompok rentan secara tersembunyi bisa efisien bagi kandidat sekaligus merugikan warga. Moderasi otomatis yang menghapus ujaran kebencian dapat mengurangi bahaya, tetapi bila tidak peka konteks bahasa dan politik, ia dapat menekan kritik yang sah. Ketika keputusan tidak dapat dijelaskan dan tidak ada jalur banding, kecepatan sistem justru mempercepat ketidakadilan. Maka, ukuran utama bukan seberapa

banyak pekerjaan yang dapat diotomatisasi, melainkan apakah otoritas yang dibantu AI tetap terbuka untuk pertanggungjawaban publik.

1. Pemilu sebagai ekosistem demokratis

Pemilu sering dibayangkan sebagai hari pencoblosan, padahal ia merupakan rangkaian yang dimulai jauh sebelum masa kampanye dan berlanjut setelah penetapan hasil. Tahapannya mencakup pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran peserta, pendidikan pemilih, komunikasi kampanye, pengawasan dana, pemungutan suara, tabulasi, penyelesaian sengketa, dan evaluasi. AI dapat memengaruhi tiap tahap dengan cara yang berbeda. Sistem pencocokan data mungkin membantu menemukan duplikasi, sementara sistem rekomendasi mengatur apa yang terlihat oleh pemilih. Karena itu, penilaian harus memetakan alur kerja lengkap dan siapa yang menerima manfaat atau menanggung risiko pada setiap simpul.

Ekosistem tersebut dihuni banyak aktor: penyelenggara pemilu, badan pengawas, partai, kandidat, konsultan, media, perusahaan platform, penyedia teknologi, peneliti, organisasi masyarakat sipil, dan pemilih. Tidak satu pun aktor mengendalikan keseluruhan sistem. Sebuah model dapat dibangun penyedia swasta, dibeli lembaga publik, dilatih dengan data yang tidak sepenuhnya dikuasai lembaga itu, lalu menghasilkan keluaran yang disebarluaskan platform lain. Fragmentasi ini membuat penentuan tanggung jawab menjadi tantangan. Kontrak pengadaan dan pembagian tugas harus menyebut dengan jelas siapa yang menguji sistem, mengoreksi kesalahan, memberi tahu publik, dan menanggung konsekuensi keputusan.

Legitimasi pemilu bertumpu pada kesetaraan politik: setiap warga memiliki hak yang setara untuk memilih dan dipertimbangkan. Teknologi bisa memperluas partisipasi jika membantu akses bagi penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, atau warga yang menggunakan bahasa daerah. Namun teknologi juga dapat menimbulkan ketimpangan baru jika kelompok dengan konektivitas rendah kehilangan akses terhadap informasi penting, atau jika model lebih akurat untuk kelompok yang datanya berlimpah. “Rata-rata akurat” tidak cukup untuk menjamin keadilan; perlu diketahui siapa yang lebih sering salah dikenali, tidak terjangkau, atau ditandai sebagai berisiko.

Cara yang bermanfaat untuk menganalisis AI pemilu ialah membedakan fungsi administratif, fungsi informasional, fungsi persuasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi administratif meliputi perencanaan sumber daya atau pengelolaan pertanyaan pemilih. Fungsi informasional memproduksi atau menyaring konten. Fungsi persuasi menyampaikan pesan untuk memengaruhi perhatian dan preferensi. Fungsi pengawasan mengidentifikasi pelanggaran atau anomali. Semakin dekat fungsi sistem pada hak, reputasi, akses, dan pilihan politik seseorang, semakin kuat kebutuhan akan penjelasan, pengawasan manusia, dan mekanisme pemulihan.

2. Di mana AI digunakan sepanjang siklus pemilu

Pada tahap administrasi pemilih, analitik dapat membantu mengidentifikasi catatan yang perlu diverifikasi, memprediksi kebutuhan logistik, menerjemahkan informasi, atau mengatur layanan tanya jawab. Model tidak sepatutnya menjadi penentu tunggal kelayakan seseorang untuk memilih. Pencocokan probabilistik dapat keliru akibat variasi ejaan nama, perubahan alamat, perbedaan transliterasi, atau data historis yang tidak mutakhir. Oleh sebab itu, sistem sebaiknya menandai catatan untuk pemeriksaan petugas, menyediakan dasar keputusan yang mudah dipahami, dan memberi warga cara mengoreksi data. Kesalahan administratif yang dapat diperbaiki sebelum hari pemungutan jauh lebih baik daripada keputusan otomatis yang baru diketahui setelah hak seseorang terganggu.

Penyelenggara dapat memanfaatkan AI untuk merangkum pertanyaan publik, mengelompokkan laporan, memperkirakan kebutuhan bahan pemungutan, atau mendeteksi pola yang tidak biasa dalam dokumen. Analitik dapat membantu mengalokasikan petugas dan mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan dukungan tambahan. Namun anomali statistik bukan bukti kecurangan. Lonjakan laporan dapat mencerminkan masalah akses, perubahan prosedur, atau kampanye pelaporan warga. Setiap sinyal otomatis perlu disandingkan dengan bukti lapangan, catatan metodologis, dan pemeriksaan manusia. Sistem harus menyimpan jejak proses agar peneliti atau auditor dapat menguji apakah temuan muncul karena data bermutu rendah atau karena pola nyata.

Dalam kampanye, AI digunakan untuk membuat variasi konten, menyusun materi visual, menganalisis sentimen, merencanakan jadwal komunikasi, mengelompokkan audiens, dan membantu layanan relawan. Beberapa fungsi dapat menurunkan hambatan bagi peserta yang sumber dayanya terbatas.

Kandidat lokal dapat memakai alat bantu untuk menyederhanakan dokumen program atau menjawab pertanyaan umum lebih cepat. Tetapi ketika kampanye menggunakan data sensitif untuk membuat inferensi tentang ketakutan, kesehatan, agama, etnisitas, atau kerentanan ekonomi pemilih, personalisasi bergeser menjadi eksploitasi. Selain privasi, ada persoalan kesetaraan: kampanye dapat menyampaikan janji yang berbeda kepada kelompok berbeda tanpa memberi publik kesempatan membandingkannya.

Sesudah pemungutan suara, alat otomatis dapat membantu mengelompokkan bukti, menelusuri rantai dokumen, dan menyaring klaim viral untuk verifikasi. Tetapi hasil resmi tetap ditentukan oleh prosedur hukum, dokumen otentik, dan kewenangan lembaga yang telah ditetapkan. AI tidak dapat mengesahkan hasil atau mengganti proses sengketa. Peran yang tepat ialah mempercepat pencarian informasi dan membantu petugas memahami volume data, sambil mempertahankan sumber asli, catatan perubahan, dan jalur pemeriksaan manual. Prinsip ini mencegah "otomasi legitimasi", yaitu anggapan bahwa keputusan menjadi benar hanya karena dihasilkan teknologi.

3. Efisiensi: manfaat nyata dan batasnya

Efisiensi dalam pemilu berarti sumber daya publik dan kampanye digunakan secara lebih tepat tanpa mengurangi kualitas hak. AI dapat mempercepat pemrosesan pertanyaan, menyediakan jawaban dasar sepanjang waktu, dan membantu menjangkau pemilih dengan hambatan bahasa atau akses. Penerjemahan otomatis, teks alternatif, transkripsi, dan antarmuka suara dapat memperluas aksesibilitas, walau hasilnya harus ditinjau untuk istilah hukum dan konteks lokal. Manfaatnya paling jelas ketika sistem mengurangi beban rutin sehingga petugas dapat mengalokasikan lebih banyak waktu untuk kasus kompleks yang memerlukan penilaian manusia.

Pemodelan kebutuhan logistik berpotensi memperbaiki perencanaan: jumlah bahan, distribusi petugas, transportasi, dan kapasitas pusat layanan dapat diperkirakan dari informasi historis. Namun prediksi mengikuti data yang digunakan. Jika catatan lama tidak menangkap perubahan penduduk, bencana, migrasi, atau hambatan baru, model akan mempertahankan gambaran masa lalu. Penggunaan yang cermat menyertakan rentang ketidakpastian dan skenario

alternatif, bukan satu angka prediksi yang tampak pasti. Petugas lokal perlu memiliki kewenangan untuk menyesuaikan rekomendasi berdasarkan pengetahuan situasional dan menyimpan alasan penyesuaian tersebut.

Perusahaan politik dapat menurunkan biaya produksi materi dan eksperimen pesan. Teknologi generatif memungkinkan tim kecil membuat draf, ilustrasi, ringkasan, atau versi bahasa yang berbeda. Kemudahan ini memperluas akses terhadap alat komunikasi, tetapi juga menurunkan biaya produksi spam, peniruan identitas, dan narasi yang dirancang untuk menyulut emosi. Pengukuran efisiensi tidak boleh berhenti pada biaya per tayangan atau tingkat interaksi. Perlu dipertanyakan apakah komunikasi membantu pemilih memahami program, apakah sumbernya dikenali, dan apakah sistem menghindari penggunaan data tanpa dasar yang sah.

Efisiensi juga memiliki dimensi distribusi. Jika manfaat AI hanya diperoleh partai besar yang mampu membeli data dan infrastruktur, teknologi memperkuat ketimpangan kompetisi. Jika layanan publik menggunakan sistem komersial yang tidak dapat diperiksa, lembaga bisa menjadi bergantung pada pemasok. Biaya total mencakup pengadaan, integrasi, keamanan, pelatihan, audit, pemeliharaan, dan rencana keluar. Karena itu, analisis manfaat perlu memasukkan biaya sosial dari kesalahan serta ketergantungan, bukan sekadar biaya lisensi. Teknologi yang murah pada awalnya dapat menjadi mahal ketika institusi kehilangan kemampuan memahami dan mengendalikan prosesnya.

4. Manipulasi politik dan propaganda komputasional

Propaganda komputasional menggabungkan otomatisasi, algoritma, data, dan kerja manusia untuk memengaruhi percakapan politik dalam skala besar (Woolley & Howard, 2016). AI generatif memperluas kemampuan produksi: satu pesan dapat diubah menjadi banyak variasi, disesuaikan dengan bahasa atau kelompok tertentu, lalu dipublikasikan melalui akun manusia maupun otomatis. Namun manipulasi tidak hanya berada pada isi pesan. Ia juga dapat muncul dalam penyamaran identitas, koordinasi tidak autentik, pembanjiran kanal, penargetan tersembunyi, dan rekayasa persepsi bahwa suatu pendapat didukung banyak orang.

Penting membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi adalah informasi salah yang dibagikan tanpa niat menipu; disinformasi dibuat atau

disebarkan dengan tujuan menyesatkan; malinformasi memakai informasi autentik dengan cara yang merugikan, seperti membocorkan data pribadi untuk mengintimidasi. AI tidak menghapus perbedaan niat ini dan tidak selalu dapat menyimpulkannya dari teks. Kebijakan moderasi yang menganggap semua konten salah sebagai kampanye terorganisasi berisiko mencap warga yang keliru sebagai pelaku jahat. Penilaian perlu melihat konteks, pola koordinasi, sumber, serta bukti pendukung.

Microtargeting memungkinkan pesan disampaikan secara berbeda kepada segmen pemilih yang berbeda. Segmentasi dapat berbasis wilayah atau isu yang secara terbuka dipilih; itu berbeda dari pemrofilan tersembunyi berdasarkan data sensitif atau inferensi psikologis. Persoalan demokratis timbul ketika kelompok menerima klaim yang saling bertentangan dan tidak ada arsip iklan untuk membandingkannya. Warga tidak dapat menilai apakah janji politik konsisten, sementara media dan lawan politik kesulitan mengawasi. Perpustakaan iklan, keterbukaan sponsor, cakupan audiens, jangka waktu, dan parameter penargetan merupakan sarana penting untuk memulihkan keterlihatan publik.

Pembuatan deepfake menambah masalah autentisitas. Suara atau video sintetis dapat menggambarkan kandidat mengatakan sesuatu yang tidak pernah diucapkan. Tetapi dampak politik tidak selalu bergantung pada satu video yang sepenuhnya meyakinkan. Konten berkualitas sedang pun dapat memperbanyak keraguan, memaksa kandidat menghabiskan waktu untuk menyangkal, atau memicu siklus “pembohong” dan “bukti palsu”. Artikel tentang kampanye Eropa mengingatkan bahwa risiko dapat berupa akumulasi konten yang memicu ketidakpercayaan umum, bukan hanya perubahan pilihan secara langsung (Pawelec, 2024). Respons perlu membedakan parodi yang jelas dari peniruan menipu dan memberikan bukti asal-usul tanpa membatasi ekspresi politik yang sah.

Bahaya lain ialah “liar’s dividend”: ketika masyarakat terbiasa mengetahui bahwa media sintetis dapat dibuat, tokoh yang tertangkap dalam rekaman autentik dapat menolaknya sebagai palsu. Dengan demikian, AI generatif mengancam baik kepercayaan pada media palsu maupun media yang benar. Infrastruktur autentikasi, dokumentasi sumber, jurnalistik yang bertanggung jawab, dan komunikasi lembaga yang cepat dapat menahan dampak ini. Namun tidak ada alat

teknis yang dapat sendirian menentukan kebenaran politik; autentikasi membuktikan asal file, bukan bahwa pernyataan di dalamnya benar atau adil.

5. Algoritma platform dan pembentukan perhatian publik

Platform digital mengatur arus informasi melalui sistem rekomendasi, peringkat, moderasi, pencarian, dan iklan. Sistem ini bukan sekadar saluran netral. Keputusan tentang konten mana yang muncul lebih dahulu memengaruhi perhatian, dan perhatian adalah sumber daya politik yang langka. Studi tentang amplifikasi algoritmik menunjukkan bahwa efek kurasi dapat berbeda berdasarkan topik, jenis sumber, dan lingkungan platform; karena itu tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap algoritma selalu menguntungkan satu kelompok secara universal (Huszár et al., 2022). Pertanyaan utama ialah apa yang dioptimalkan, bagaimana dampaknya diukur, dan siapa yang dapat melihatnya. Analisis kritis tentang algoritma menekankan bahwa pemahaman perlu mencakup konteks sosial dan keputusan institusional yang membingkai operasi teknisnya (Kitchin, 2017).

Banyak sistem komersial mengoptimalkan keterlibatan karena perhatian berkaitan dengan pendapatan iklan. Konten yang memicu kemarahan, kejutan, atau identitas kelompok dapat menghasilkan interaksi tinggi, meskipun interaksi bukan ukuran deliberasi yang berkualitas. Namun hubungan antara model bisnis dan polarisasi tidak boleh disederhanakan. Pengguna memilih dan menafsirkan konten; media politik, struktur partai, ketidaksetaraan sosial, dan peristiwa offline turut membentuk percakapan. Kajian yang baik menghindari penjelasan tunggal "algoritma menyebabkan polarisasi" dan menelusuri mekanisme spesifik, populasi, waktu, serta pembanding yang relevan.

Kurasi personal dapat membuat pengalaman pengguna terasa relevan tetapi mengurangi kesamaan ruang informasi. Dua warga dapat menerima gambaran yang sangat berbeda mengenai isu, kandidat, atau peristiwa yang sama. Keberagaman informasi tidak mensyaratkan semua orang melihat konten yang identik; demokrasi tetap memerlukan fakta dasar bersama dan kemampuan memeriksa klaim lintas kelompok. Platform dapat mendukung pengaturan pengguna yang mudah dipahami, pilihan feed kronologis atau berbasis kepentingan, dan kontrol atas personalisasi politik. Peneliti memerlukan akses data yang aman dan independen agar dampak perubahan sistem dapat dievaluasi.

Komunikasi politik melalui grup pesan privat menambah kompleksitas. Pesan dapat beredar melalui jaringan keluarga, organisasi, komunitas keagamaan, atau relawan tanpa jejak publik yang mudah dianalisis. Privasi percakapan harus dihormati, tetapi risiko penipuan dan distribusi massal dapat diatasi dengan pembatasan penerusan, kanal pelaporan, dan pusat klarifikasi yang kredibel. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pemantauan umum atas percakapan warga. Keseimbangan terbaik menggabungkan desain yang mengurangi viralitas otomatis dengan akses sukarela pada informasi verifikasi dan edukasi komunitas.

6. Indonesia: skala, keragaman, dan pengalaman pemilu digital

Pemilu Indonesia diselenggarakan dalam konteks geografis dan sosial yang sangat beragam. Wilayah kepulauan, perbedaan akses internet, ragam bahasa, urbanisasi, dan variasi literasi membuat solusi satu ukuran tidak memadai. Sistem AI yang bekerja baik dalam bahasa Indonesia baku dapat gagal menangani bahasa daerah, campur kode, humor, sindiran, atau istilah politik yang berubah cepat. Data digital juga tidak mewakili semua warga secara merata. Masyarakat yang kurang terkoneksi mungkin kurang terlihat di data, padahal kebutuhan informasinya tidak lebih kecil. Karena itu, desain layanan AI perlu melibatkan pemilih dan petugas dari konteks yang beragam, bukan hanya mengandalkan benchmark umum.

Pemilu 2024 menjadi momen penting ketika alat AI generatif mulai menonjol dalam komunikasi politik Indonesia. Pemberitaan dan kajian awal menyoroti pemakaian alat digital dalam kampanye dan kemunculan representasi kandidat yang dibuat atau dibantu AI. Peristiwa ini perlu dibahas secara hati-hati: keberadaan materi AI menunjukkan bahwa teknologi telah masuk ke repertoar kampanye, tetapi tidak secara otomatis menunjukkan efektivitas persuasif, niat menipu, atau dampak pada hasil. Kajian Jalli dan Wihardja (2024) membahas pelajaran integritas dari Indonesia, termasuk perlunya respons terhadap konten AI sepanjang rantai informasi. Studi kualitatif Subekti et al. (2025) mendokumentasikan pola disinformasi terhadap kandidat pada Pemilu Presiden Indonesia 2024; temuan tentang penggunaan media sosial tersebut memberi konteks penting, tetapi tidak dengan sendirinya mengisolasi efek kausal AI terhadap hasil pemungutan suara. Penelitian lebih lanjut perlu mengarsipkan materi, konteks penyebaran, dan penerimaan audiens secara transparan.

Batas antara satire, hiburan, kampanye kreatif, dan representasi menipu dapat berubah menurut konteks. Visual yang jelas bersifat karikatural mungkin dipahami sebagai ekspresi atau promosi, sedangkan suara kandidat yang ditiru untuk menyampaikan instruksi palsu tentang pemungutan suara dapat langsung membahayakan. Aturan pelabelan yang hanya memeriksa apakah konten dibuat AI akan melewatkan persoalan terpenting: apakah konten mengubah persepsi tentang tindakan atau ucapan seseorang, apakah penonton dapat mengenali sifat sintetisnya, dan apakah konteksnya memengaruhi hak atau keselamatan. Penilaian kontekstual memerlukan standar dan proses banding yang dapat dipahami publik.

Kerangka hukum Indonesia menyediakan sejumlah pijakan relevan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur pemrosesan data pribadi, hak subjek data, dan hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis tertentu yang berdampak hukum atau signifikan. Prinsip ini relevan bagi penggunaan pemrofilan dan keputusan otomatis dalam konteks politik. Implementasi konkret tetap memerlukan tafsir hukum, pembagian kewenangan, dan koordinasi antarlembaga. Pemilu juga diatur oleh hukum dan peraturan sektoral; artikel ini tidak menggantikan nasihat hukum atau penelaahan atas aturan terbaru.

Prioritas Indonesia perlu mencakup kemampuan bahasa dan pemeriksaan konten daerah. Sistem moderasi yang dilatih terutama dengan data bahasa dominan berpotensi salah menghapus kritik, gagal mengenali ujaran berbahaya dalam dialek, atau salah membaca konteks lokal. Membuat dataset evaluasi yang representatif harus dilakukan dengan persetujuan yang layak, tata kelola privasi, dan keterlibatan komunitas. Kerja sama antara perguruan tinggi, organisasi pemeriksa fakta, media, penyelenggara, dan masyarakat sipil dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kuat dibanding solusi yang sepenuhnya disediakan vendor. Kapasitas lokal merupakan bagian dari kedaulatan demokratis, bukan semata kebijakan industri.

7. Kepercayaan publik dan integritas epistemik

Kepercayaan publik bukan berarti warga harus menerima setiap klaim penyelenggara atau kandidat. Dalam demokrasi, kepercayaan yang sehat bersifat bersyarat: lembaga dipercaya karena prosedurnya dapat diperiksa, kesalahan dapat dikoreksi, dan kritik tidak dihukum. Kepercayaan seperti ini berbeda dari

kepatuhan tanpa pertanyaan. Sistem AI dapat membantu menyediakan informasi, tetapi jika prosesnya opak, sulit diaudit, atau dikuasai vendor, ia dapat mengikis alasan untuk percaya. Transparansi yang bermakna mencakup tujuan penggunaan, kategori data, metode evaluasi, keterbatasan, hasil audit, dan jalur pengaduan.

Konten sintetis menimbulkan krisis epistemik ketika publik tidak dapat mengetahui apakah bukti digital autentik. Namun respons yang hanya mengandalkan detektor AI juga tidak memadai: detektor dapat salah, berubah seiring kemajuan generator, atau bias terhadap bahasa dan kualitas rekaman tertentu. Penanda digital seperti metadata asal konten dapat membantu, tetapi dapat hilang saat file disalin atau diubah. Maka autentikasi perlu menggabungkan tanda asal-usul, arsip resmi, verifikasi jurnalis, saksi, pencatatan proses, dan pembandingan berbagai sumber. Dalam kasus sengketa, penjelasan tentang metode verifikasi dan tingkat kepastian sama pentingnya dengan kesimpulan.

Institusi dapat memelihara kepercayaan melalui komunikasi risiko yang jujur. Mengumumkan bahwa sistem memiliki keterbatasan tidak otomatis merusak legitimasi; menyembunyikan kesalahan lalu membiarkannya terungkap dari pihak lain lebih merusak. Saat ada materi palsu yang viral, respons harus cepat tetapi tidak gegabah: simpan salinan dan bukti asalnya, periksa klaim secara independen, jelaskan apa yang diketahui dan belum diketahui, dan berikan pembaruan. Menyebarkan ulang konten berbahaya untuk membantahnya dapat memperluas jangkauan, sehingga klarifikasi sebaiknya mengutip seperlunya dan mengarahkan pada sumber rujukan yang stabil.

Kepercayaan juga ditentukan oleh keadilan prosedural. Warga akan lebih menerima keputusan yang merugikan mereka bila diberi alasan yang layak, didengar, dan memiliki jalur koreksi. Ini tidak berarti semua orang harus menyetujui hasil. Ia berarti lembaga memperlakukan warga sebagai subjek politik, bukan sekadar titik data. Pada AI pemilu, prinsip ini menuntut pemberitahuan yang dapat dimengerti ketika sistem membantu keputusan penting, kontak manusia yang bertanggung jawab, dan kesempatan untuk meninjau hasil. Penjelasan yang hanya menyebut “sistem mendeteksi risiko” tidak memadai sebagai alasan administratif.

8. Bias, privasi, keamanan, dan ketimpangan

Bias algoritmik dapat muncul dari data yang tidak mewakili populasi, label yang mencerminkan ketidakadilan lama, pilihan fitur, ukuran keberhasilan, atau cara sistem digunakan. Dalam konteks pemilu, bias dapat menyebabkan kesalahan berbeda pada kelompok bahasa, wilayah, gender, usia, atau status sosial. Audit perlu melaporkan bukan hanya akurasi keseluruhan, tetapi juga tingkat kesalahan untuk kelompok relevan, ketidakpastian, dan konsekuensi salah positif maupun salah negatif. Data sensitif tidak boleh dikumpulkan hanya karena secara teknis bisa. Penilaian harus menghubungkan pengukuran ke tujuan yang sah dan risiko terhadap hak.

Pemrofilan pemilih dapat memanfaatkan jejak digital untuk memperkirakan preferensi atau kerentanan. Inferensi semacam ini dapat keliru sekaligus invasif. Seseorang mungkin dikelompokkan sebagai mudah dipengaruhi karena pola konsumsi informasi, lokasi, atau relasi sosial, padahal model hanya menangkap korelasi. Penggunaan kategori sensitif—langsung atau melalui proksi—berpotensi mendiskriminasi dan merusak kebebasan memilih. Prinsip minimisasi data meminta kampanye dan lembaga hanya mengumpulkan informasi yang diperlukan, menjelaskan dasar pemrosesan, membatasi retensi, mengamankan akses, dan menolak penggunaan sekunder yang tidak sejalan dengan tujuan awal.

Keamanan siber memiliki dimensi pemilu yang luas. Sistem administrasi, daftar pemilih, situs informasi, akun kandidat, media, dan platform komunikasi dapat menjadi sasaran pencurian, gangguan, atau pemalsuan. AI dapat membantu mendeteksi pola serangan, tetapi juga dapat mempercepat rekayasa sosial, phishing, dan otomatisasi percobaan kredensial. Keamanan karena itu harus mengikuti pendekatan berlapis: kontrol akses, pencadangan, respons insiden, simulasi, komunikasi publik, serta verifikasi manual untuk prosedur kritis. Sistem AI sendiri memerlukan keamanan model dan data, termasuk pembatasan akses serta evaluasi terhadap input berbahaya.

Ketimpangan digital memengaruhi baik produksi maupun konsumsi informasi. Kandidat yang memiliki sumber daya lebih besar dapat membeli analitik, infrastruktur, dan jasa kreatif; kelompok warga yang tidak terkoneksi memiliki peluang lebih kecil untuk menerima klarifikasi atau menyampaikan aspirasi melalui kanal daring. Pemerataan bukan sekadar menyediakan aplikasi, melainkan memastikan informasi tersedia dalam format yang dapat digunakan,

melalui saluran daring dan luring, serta mempertimbangkan aksesibilitas. Kebijakan pemilu harus menghindari asumsi bahwa tingginya penggunaan media sosial berarti seluruh warga terwakili di sana.

9. Kerangka tata kelola yang berpusat pada demokrasi

Tata kelola AI pemilu sebaiknya berangkat dari penilaian risiko dan dampak hak, bukan larangan menyeluruh atau kepercayaan tanpa syarat. Langkah pertama adalah inventaris sistem: siapa pengembang dan penggunanya, tujuan, jenis data, tingkat otomatisasi, siapa yang terdampak, apakah sistem berinteraksi dengan publik, dan bagaimana keluaran dapat memengaruhi hak. Langkah kedua ialah mengklasifikasikan risiko. Penerjemah informasi umum memiliki konsekuensi yang berbeda dengan sistem yang menandai pemilih, menilai kelayakan, membatasi konten, atau membuat keputusan yang berdampak pada hak politik.

Sebelum digunakan, sistem berisiko tinggi perlu menjalani penilaian dampak algoritmik dan hak asasi manusia. Penilaian harus melibatkan petugas teknis, ahli hukum, pengelola pemilu, kelompok terdampak, serta organisasi independen. Pertanyaan penting meliputi: apakah tujuan dapat dicapai dengan cara yang kurang invasif; apakah data memadai dan representatif; bagaimana kesalahan diuji; apa konsekuensi bagi kelompok berbeda; siapa mengawasi vendor; apakah warga dapat mengajukan banding; dan bagaimana sistem dihentikan jika gagal. Penilaian bukan dokumen kepatuhan yang dibuat sekali, tetapi proses yang diperbarui ketika data, konteks, atau model berubah.

Transparansi perlu memiliki lapisan. Publik memerlukan daftar sistem yang digunakan, tujuan, lembaga penanggung jawab, ringkasan penilaian risiko, prosedur pengaduan, dan informasi tentang penggunaan konten sintetis dalam iklan politik. Auditor memerlukan akses lebih terperinci terhadap data uji, dokumentasi, konfigurasi, dan catatan keputusan, dengan perlindungan rahasia dagang dan data pribadi yang proporsional. Peneliti memerlukan akses data yang aman untuk mengevaluasi dampak sistem. Kerahasiaan komersial tidak dapat menjadi alasan mutlak untuk menutup sistem yang memengaruhi hak politik.

Akuntabilitas tidak boleh dipindahkan kepada mesin atau kontraktor. Lembaga pengguna tetap bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat dengan bantuan AI. Vendor bertanggung jawab atas kewajiban yang disepakati, keamanan,

dokumentasi, dan pemberitahuan perubahan. Platform bertanggung jawab menjelaskan kebijakan iklan, moderasi, dan penanganan konten manipulatif secara konsisten. Auditor independen perlu diberi mandat dan akses yang memadai. Warga harus dapat meminta penjelasan dan koreksi. Pengaturan kontrak perlu mencakup audit, retensi dan penghapusan data, insiden keamanan, portabilitas, aksesibilitas, serta hak menghentikan sistem.

Pengawasan harus proporsional agar tidak berubah menjadi sensor politik. Larangan konten yang terlalu luas dapat menguntungkan pihak yang berkuasa dan membatasi kritik. Tindakan seperti pelabelan, pengurangan amplifikasi, penghentian iklan, atau penghapusan sebaiknya memiliki dasar yang transparan, penerapan yang konsisten, dan proses banding. Dalam ancaman langsung—misalnya instruksi palsu tentang tempat atau waktu pemungutan—respons darurat bisa diperlukan, tetapi harus didokumentasikan dan ditinjau sesudahnya. Ketika ketidakpastian tinggi, kebijakan dapat mendahulukan konteks, pelabelan, dan pembatasan distribusi sementara dibanding penghapusan permanen.

10. Peran penyelenggara, platform, partai, media, dan masyarakat sipil

Penyelenggara pemilu perlu menerbitkan standar penggunaan AI untuk fungsi internal dan informasi publik. Standar tersebut dapat menjelaskan sistem yang sedang diuji, keputusan yang tidak akan diserahkan penuh kepada otomatisasi, persyaratan keamanan, proses audit, serta jalur pengaduan. Pengadaan teknologi harus menilai kemampuan lembaga untuk memahami, menguji, dan mengakhiri kontrak. Pelatihan bagi petugas diperlukan agar mereka mampu mengenali keluaran yang tidak pasti, melakukan verifikasi, dan menjelaskan keputusan kepada warga. AI dapat membantu menyaring pekerjaan; petugas tetap menjadi pemegang tanggung jawab publik.

Platform digital memiliki tanggung jawab karena desain rekomendasi, iklan, dan moderasi ikut membentuk kondisi percakapan politik. Mereka sebaiknya menyediakan arsip iklan politik yang dapat ditelusuri, mengungkap sponsor, menampilkan parameter penargetan yang relevan, dan menerbitkan laporan dalam bahasa lokal. Konten sintetis yang menyerupai orang nyata dalam konteks politik memerlukan pelabelan yang terlihat dan konsisten, kecuali untuk kasus ekspresi yang jelas seperti satire, dengan standar yang diumumkan. Platform juga dapat membatasi perilaku koordinasi tidak autentik dan memperlambat pola

penyebaran otomatis yang berisiko tinggi tanpa menutup percakapan warga secara umum.

Partai dan kandidat perlu memiliki kode perilaku yang mengatur AI generatif, penggunaan data, identitas akun, dan iklan digital. Mereka dapat berkomitmen memberi label untuk konten realistis yang dibuat atau diubah secara material dengan AI, menyimpan arsip materi kampanye, tidak meniru kandidat atau pejabat lain secara menipu, dan menyediakan kontak untuk koreksi. Komitmen sukarela lebih kredibel jika ada mekanisme internal untuk melapor dan konsekuensi bagi pelanggaran. Transparansi akan membantu pemilih menilai strategi komunikasi tanpa melarang inovasi kreatif.

Media dan pemeriksa fakta perlu mengembangkan praktik verifikasi yang sesuai dengan konten sintetis. Proses ini harus mencatat sumber file, waktu penerimaan, konteks distribusi, teknik verifikasi, dan tingkat keyakinan. Pemeriksa fakta sebaiknya tidak menyebarkan konten palsu lebih luas hanya untuk membantahnya. Media juga dapat memberikan konteks tentang apa yang dapat dan tidak dapat disimpulkan dari detektor AI. Dalam pemilu yang bergerak cepat, koreksi perlu ditempatkan dekat dengan klaim yang diperiksa, diperbarui saat ada bukti baru, dan tidak menghapus jejak pembaruan.

Universitas dan organisasi masyarakat sipil dapat menyelenggarakan pemantauan independen, mengembangkan literasi media, dan membantu merancang audit yang peka terhadap hak. Pemantauan terbuka harus mematuhi privasi dan metodologi yang dapat direplikasi. Peneliti tidak boleh menganggap akun yang berperilaku tidak biasa pasti bot atau terkoordinasi. Kolaborasi lintas pihak dapat mempercepat verifikasi, tetapi harus melindungi independensi redaksi, keamanan sumber, dan kebebasan akademik. Ruang sipil yang kuat merupakan bagian dari infrastruktur integritas pemilu.

11. Agenda implementasi untuk Indonesia

Agenda implementasi yang realistis dapat dimulai dengan inventarisasi penggunaan AI dan sistem otomatis dalam proses pemilu. Setiap lembaga menyusun daftar tujuan, pemasok, data yang digunakan, tingkat dampak, dan pemilik keputusan. Informasi ini menjadi dasar prioritas: sistem berisiko rendah dapat diperbaiki melalui standar teknis dan perlindungan data dasar; sistem

berisiko tinggi harus menjalani penilaian dampak, uji kelompok, dan audit independen sebelum operasional. Inventarisasi juga menghindari situasi ketika AI dipakai melalui aplikasi pihak ketiga yang tidak dianggap sebagai sistem AI oleh organisasi pengguna.

Langkah berikutnya adalah menyusun protokol penggunaan AI generatif dalam kampanye dan komunikasi resmi. Protokol dapat menetapkan kapan pengungkapan diperlukan, bagaimana label ditampilkan, bagaimana materi asli disimpan, serta siapa yang bertanggung jawab atas koreksi. Pengungkapan harus mudah dibaca dan tidak disembunyikan pada tautan atau deskripsi yang tidak terlihat. Untuk konten yang meniru suara atau wajah nyata, transparansi perlu lebih kuat karena risiko salah atribusi lebih tinggi. Protokol harus memperhitungkan satire, seni, dan ekspresi politik yang tidak bermaksud menipu agar aturan tidak menjadi pembatas kritik.

Indonesia memerlukan kapasitas pemeriksaan berbasis bahasa dan wilayah. Investasi pada dataset evaluasi, korpus hoaks yang sudah dianonimkan, dokumentasi dialek, serta alat verifikasi dapat dilakukan melalui konsorsium perguruan tinggi dan organisasi masyarakat. Namun penyusunan dataset harus mengikuti prinsip minimisasi dan tujuan yang sah. Konten yang dikumpulkan untuk riset tidak semestinya dipakai kembali untuk penargetan politik. Hasil audit harus dipublikasikan dengan cukup detail agar bermanfaat tanpa mengekspos data pribadi atau memudahkan serangan terhadap sistem.

Kesiapsiagaan pemilu membutuhkan latihan skenario. Lembaga dan platform dapat mensimulasikan penyebaran rekaman palsu, gangguan sistem informasi, kebocoran data pemilih, atau konten menyesatkan tentang prosedur memilih. Latihan sebaiknya mencakup pertanyaan siapa yang mengonfirmasi, siapa mengumumkan, bagaimana media menerima bukti, berapa lama respons, dan bagaimana kesalahan diperbaiki. Simulasi mengungkap ketergantungan dan hambatan koordinasi sebelum krisis nyata. Setelah setiap pemilu, evaluasi terbuka perlu merangkum insiden, respons, kendala, serta perbaikan yang direncanakan.

Pendidikan pemilih harus memadukan literasi politik dan literasi digital. Warga perlu memahami cara memeriksa klaim, membedakan sumber resmi dan akun tiruan, membaca label iklan, serta mengenali tanda konten sintetis tanpa menganggap penampilan visual sebagai bukti pasti. Pendidikan ini sebaiknya tidak meletakkan seluruh beban pada pengguna. Tanggung jawab utama tetap

pada pihak yang membuat dan mendistribusikan konten serta lembaga yang mengatur platform. Literasi publik menjadi efektif bila dilengkapi akses pada informasi resmi, media independen, dan mekanisme pengaduan yang bekerja.

12. Prinsip desain bagi AI yang kompatibel dengan demokrasi

Prinsip pertama ialah tujuan yang sah dan terbatas. Setiap sistem harus menjelaskan masalah yang hendak diselesaikan, siapa yang memberi mandat, siapa yang terdampak, dan alternatif yang dipertimbangkan. “Modernisasi” atau “inovasi” bukan tujuan yang cukup. Prinsip kedua ialah minimisasi data: hanya data yang benar-benar diperlukan yang diproses, untuk waktu yang terbatas, dengan keamanan yang sesuai. Prinsip ketiga ialah keterjelasan: pengguna dan warga harus mengetahui kapan AI berperan dan jenis kontribusinya. Penjelasan tidak harus membuka kode sumber, tetapi perlu menjelaskan faktor keputusan dan batas sistem dengan bahasa yang dapat dipahami.

Prinsip keempat adalah kendali manusia yang bermakna. Pengawas harus memiliki kompetensi, waktu, dan kewenangan untuk menolak keluaran model. Jika operator hanya menekan tombol setuju karena beban kerja atau tekanan organisasi, “human in the loop” menjadi formalitas. Prinsip kelima ialah kemampuan mengoreksi dan mengajukan keberatan. Keputusan yang berdampak terhadap hak harus disertai alasan dan jalur pemulihan yang tidak membebani warga secara tidak wajar. Prinsip keenam adalah auditabilitas: keputusan penting dan perubahan model dicatat, sehingga pihak berwenang dapat menelusuri mengapa hasil muncul.

Prinsip ketujuh ialah inklusivitas linguistik dan sosial. Sistem harus diuji pada variasi bahasa, aksesibilitas, kondisi konektivitas, dan kebutuhan kelompok terdampak. Prinsip kedelapan ialah keamanan dan ketahanan: ancaman terhadap data, model, dan rantai pasok dinilai secara berkala. Prinsip kesembilan ialah keterbukaan terhadap evaluasi independen. Tidak cukup bagi pemasok menyatakan sistem akurat; perlu dibuktikan melalui ukuran yang relevan dan diuji dalam konteks nyata. Prinsip kesepuluh ialah keberlanjutan dan kemampuan keluar: lembaga dapat menghentikan sistem, menghapus atau mengembalikan data, serta mempertahankan fungsi kritis saat teknologi tidak tersedia.

Prinsip-prinsip tersebut menghubungkan tata kelola AI dengan nilai publik. Investigasi jurnalistik atas sistem komputasional juga menempatkan transparansi dan audit sebagai prasyarat untuk memeriksa struktur kekuasaan (Diakopoulos, 2015). Literatur akuntabilitas AI menekankan bahwa tanggung jawab tetap berada pada aktor manusia dan organisasi yang merancang, membeli, serta menggunakan sistem (Busuioc, 2021). Kajian tentang sistem algoritmik sektor publik juga menunjukkan bahwa dampak harus ditelaah sejak perumusan masalah dan pengadaan hingga implementasi serta evaluasi (Levy et al., 2021). Dalam pemilu, tanggung jawab ini harus dibagi secara jelas tetapi tidak dilarutkan. Vendor, lembaga, partai, dan platform memiliki kewajiban berbeda. Jika ada kegagalan, publik harus mengetahui siapa yang dapat memperbaikinya dan bagaimana warga terdampak memperoleh pemulihan. Sistem yang dapat ditelusuri akan lebih mudah dikoreksi daripada sistem yang hanya menghasilkan skor tanpa jejak.

13. Mengukur keberhasilan: melampaui kecepatan dan jangkauan

Pengukuran keberhasilan AI pemilu harus mencakup dimensi operasional, hak, dan demokrasi. Indikator operasional meliputi waktu respons, ketersediaan layanan, proporsi kasus yang ditangani benar, dan biaya siklus hidup. Indikator hak meliputi tingkat kesalahan per kelompok, insiden privasi, pengaduan, koreksi, dan dampak terhadap akses. Indikator demokrasi mencakup keterbukaan informasi, kesetaraan akses kampanye, keandalan sumber, kualitas penjelasan, dan kepercayaan yang dibangun melalui proses. Indikator tidak seharusnya sekadar menghitung jumlah konten yang dihapus atau jumlah pengguna yang dijangkau.

Pengujian harus dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemilu. Sebelum pemakaian, lakukan uji kinerja dan simulasi berdasarkan skenario beragam. Selama masa kampanye, pantau perubahan model, pola kesalahan, dan insiden yang dilaporkan. Setelah pemilu, evaluasi hasil dengan data teragregasi dan metode yang jelas. Perubahan algoritma platform selama periode sensitif sebaiknya didokumentasikan secara transparan sehingga periset dapat membedakan dampak kampanye dari perubahan distribusi konten. Evaluasi independen mengurangi konflik kepentingan ketika organisasi menilai teknologi yang mereka beli atau operasikan.

Ukuran harus peka pada trade-off. Filter yang menangkap lebih banyak konten berbahaya mungkin juga menghapus lebih banyak kritik yang sah. Sistem yang cepat mungkin memberi jawaban salah sebelum ada pemeriksaan. Segmentasi dapat meningkatkan relevansi sekaligus memperbesar ketimpangan informasi. Keputusan kebijakan memerlukan data tentang trade-off tersebut dan penjelasan nilai yang dipilih. Tidak ada satu angka "akurasi" yang menyelesaikan persoalan. Metrik harus disertai audit kualitatif, studi dampak, dan ruang untuk masukan warga.

Penilaian dampak juga perlu menanyakan apakah manfaat yang diklaim benar-benar terjadi. Jika AI dikatakan memperluas akses, apakah kelompok yang sebelumnya kurang terlayani menerima informasi lebih baik? Jika disebut mengurangi disinformasi, apakah klaim yang salah memang lebih lambat tersebar tanpa menekan berita yang benar? Jika memudahkan administrasi, apakah beban petugas berkurang atau hanya bergeser menjadi pekerjaan memeriksa keluaran model? Evaluasi semacam ini menghindari bias optimisme teknologi dan membuat keputusan investasi lebih rasional.

14. Skenario masa depan pemilu

Skenario pertama adalah penguatan demokrasi melalui AI yang dibatasi tujuan dan dibuka untuk pengawasan. Dalam skenario ini, alat penerjemah dan asisten informasi membantu warga memahami prosedur, analitik memperbaiki logistik, arsip iklan membuat persuasi politik lebih terlihat, dan audit independen menemukan bias sebelum menimbulkan kerugian besar. Investasi dilakukan pada kapasitas publik, bukan hanya pembelian sistem. Warga tetap dapat mengakses informasi melalui kanal luring; petugas mempertahankan kewenangan dan tanggung jawab. AI memperluas kapasitas demokratis karena membantu orang menyelesaikan tugas, bukan mengambil alih hak untuk menilai.

Skenario kedua ialah pemilu yang dikelola melalui ketergantungan platform. Partai dan lembaga menggunakan layanan komersial untuk penargetan, analitik, moderasi, dan komunikasi. Pengetahuan tentang pemilih terkonsentrasi pada perusahaan, sedangkan publik hanya melihat hasil yang sudah dikurasi. Sistem memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam jangka pendek, tetapi aturan dapat berubah tanpa konsultasi dan lembaga kesulitan pindah pemasok. Kepercayaan

bergantung pada klaim perusahaan yang tidak dapat diuji. Risiko ini tidak memerlukan skandal besar; ketergantungan dan kurangnya pilihan dapat perlahan menggeser otoritas dari institusi demokratis ke infrastruktur privat.

Skenario ketiga adalah perlombaan manipulasi. Produksi pesan sintetis dan akun otomatis terus meningkat, sementara moderasi dan pemeriksaan fakta tertinggal. Konten tidak harus sangat meyakinkan; cukup menimbulkan kebingungan, merusak reputasi, atau membuat warga curiga pada semua bukti. Kampanye menjadi makin personal dan tersembunyi, sementara aturan lama sulit mengidentifikasi sponsor. Respons pemerintah yang terlalu keras dapat memperparah keadaan dengan sensor atau pemantauan massal. Skenario ini dapat dicegah jika kesiapsiagaan dibangun sebelum masa kampanye, bukan sesudah krisis viral.

Skenario keempat adalah demokrasi yang belajar secara adaptif. Lembaga menetapkan batas hak, tetapi menguji cara teknis yang berbeda secara terbuka. Audit, konsultasi warga, dan evaluasi pemilu memperbarui aturan berdasarkan bukti. Kesalahan diakui dan sistem diperbaiki; eksperimen dihentikan bila menimbulkan dampak buruk. Regulasi menetapkan standar minimum yang melindungi hak, sementara inovasi dapat berjalan di bawah pengawasan. Ini bukan keseimbangan statis, melainkan kapasitas institusi untuk menyesuaikan diri tanpa meninggalkan prinsip dasar.

15. Kesimpulan

AI tidak menentukan masa depan pemilu secara otomatis. Teknologi memberi kapasitas baru untuk menganalisis, membuat, dan menyebarkan pesan; hasil politik muncul melalui hubungan antara desain sistem, kepentingan aktor, kualitas institusi, ketimpangan sosial, aturan, dan perilaku warga. AI dapat mempercepat layanan, membantu perencanaan, meningkatkan aksesibilitas, dan menyediakan cara baru untuk memahami aspirasi publik. Namun AI juga menurunkan biaya manipulasi, memfasilitasi pemrofilan, memperbesar asimetri informasi, serta membuat autentisitas bukti lebih sulit dinilai. Kedua sisi ini hadir bersamaan dan harus dinilai pada tingkat penggunaan yang konkret.

Perdebatan “efisiensi atau manipulasi” berisiko terlalu sempit. Efisiensi sendiri dapat menjadi alat konsentrasi kekuasaan bila manfaatnya hanya dinikmati aktor tertentu atau bila keputusan tidak dapat diawasi. Sebaliknya, teknologi yang

digunakan secara hati-hati dapat membantu warga dan petugas mengatasi hambatan nyata. Pertanyaan yang lebih produktif adalah: efisien bagi siapa, dengan data siapa, di bawah kendali siapa, dan dengan mekanisme koreksi apa? Pertanyaan tersebut mengarahkan perhatian dari teknologi sebagai objek abstrak menuju relasi kuasa, tanggung jawab, dan hak yang dibentuk oleh penggunaannya.

Untuk Indonesia, prioritasnya ialah membangun tata kelola yang kuat, kontekstual, dan bisa dijalankan: inventarisasi sistem, penilaian dampak, perlindungan data, pengungkapan konten sintetis, arsip iklan politik, audit yang independen, kesiapan bahasa daerah, koordinasi lintas lembaga, dan literasi pemilih. Aturan harus melindungi kritik dan satire sekaligus menanggapi peniruan yang menipu serta gangguan prosedur. Penyelenggara harus mempertahankan kendali manusia pada keputusan berdampak tinggi; platform dan kampanye perlu membuka praktik yang membentuk perhatian serta target politik. Pengawasan wajib disertai jalur banding dan transparansi agar upaya melindungi pemilu tidak berubah menjadi pembatasan hak.

Kepercayaan publik merupakan hasil dari proses yang adil dan dapat diuji. Label AI, deteksi deepfake, atau model yang lebih akurat tidak cukup jika lembaga tidak menjelaskan keputusan, menyimpan bukti, dan memperbaiki kesalahan. Demokrasi memerlukan warga yang mampu berbeda pendapat sekaligus berbagi ruang untuk menguji klaim. AI dapat mendukung ruang itu bila dirancang untuk memperkaya informasi, memperluas partisipasi, dan memperkuat akuntabilitas. Jika dipakai tanpa batas dan tanpa pertanggungjawaban, ia dapat menjadikan politik lebih terarah oleh data tetapi kurang terbuka bagi warga. Masa depan pemilu ditentukan oleh pilihan institusional: apakah teknologi dikelola sebagai infrastruktur kepentingan publik atau dibiarkan menjadi mekanisme pengaruh yang tidak terlihat.

16. Persuasi politik dan otonomi pemilih

Persuasi merupakan bagian sah dari demokrasi. Kandidat menyampaikan alasan, nilai, rekam jejak, dan janji agar pemilih mempertimbangkan pilihannya. Penggunaan teknologi untuk mengorganisasi komunikasi bukan dengan sendirinya manipulatif. Persoalan etis muncul ketika cara persuasi mengurangi kemampuan seseorang untuk menilai secara sadar, misalnya dengan

menyembunyikan identitas pengirim, menekan warga dengan pesan berulang yang tidak dapat mereka hentikan, mengeksploitasi data tentang kondisi rapuh, atau menampilkan klaim yang dirancang berbeda kepada kelompok yang tidak saling mengetahui. Perbedaan kuncinya bukan antara komunikasi analog dan digital, melainkan antara komunikasi yang dapat dikenali dan ditanggapi dengan komunikasi tersembunyi yang menyalahgunakan asimetri informasi.

Otonomi pemilih menuntut adanya ruang untuk menimbang alasan yang beragam. Sistem rekomendasi dan pesan personal dapat membantu warga menemukan isu yang relevan, tetapi mereka juga dapat membingkai agenda secara sempit. Ketika seorang pemilih hanya melihat materi yang memperkuat prasangka atau ditargetkan atas dasar ketakutan, proses pilihan masih tampak sukarela namun lingkungan informasinya telah direkayasa. Ini tidak berarti personalisasi harus dilarang. Yang perlu dibatasi adalah penggunaan profil intim tanpa persetujuan, penyamaran sponsor, dan ketertutupan yang menghalangi pemeriksaan publik. Transparansi membuat warga dapat memahami mengapa suatu pesan datang kepada mereka.

Penerapan prinsip otonomi memerlukan desain yang memberi warga kontrol. Pengguna perlu dapat mengatur iklan dan personalisasi, menolak pemanfaatan data untuk tujuan politik tertentu, serta mengakses informasi mengenai sponsor dan dasar target iklan. Kampanye dapat menyimpan arsip pesan sehingga moderator, wartawan, dan peneliti dapat membandingkan klaim. Keterbukaan seperti ini tidak menghilangkan persuasi; ia mengembalikan persuasi ke ruang yang dapat diperdebatkan. Batasan harus disusun proporsional agar tidak menghalangi komunikasi konstituen, kampanye berbasis isu, atau penyampaian informasi yang bermanfaat.

Keputusan warga tidak sepenuhnya rasional dalam arti sempit, dan emosi bukan lawan dari demokrasi. Kekhawatiran terhadap pekerjaan, keamanan, identitas, atau masa depan dapat menjadi dasar deliberasi yang sah. Masalah timbul ketika sistem secara sistematis menguji pemicu emosional melalui eksperimen tersembunyi untuk mengeksploitasi rasa takut atau kebencian. Penggunaan AI untuk memilih kata yang jelas dan mudah dipahami berbeda dari penggunaan AI untuk menemukan titik rentan psikologis individu. Karena itu, aturan kampanye perlu berfokus pada praktik dan konteks, bukan pada asumsi bahwa seluruh pesan yang menyentuh emosi adalah manipulatif.

17. Integritas informasi dan ketahanan masyarakat

Integritas informasi adalah kondisi ketika masyarakat dapat menemukan dan menilai informasi yang cukup akurat untuk mengambil keputusan bersama. Ia bukan keadaan tanpa konflik, klaim salah, atau propaganda; ruang demokratis selalu memiliki perbedaan pandangan dan kontestasi. Integritas dibangun melalui sistem media yang plural, lembaga yang dapat dimintai keterangan, akses pada data resmi, kebebasan jurnalisme, dan norma koreksi. AI mengubah kecepatan serta skala distribusi, tetapi kualitas infrastruktur sosial tersebut tetap sangat menentukan. Jika sumber resmi tidak dipercaya dan media lokal melemah, konten verifikasi otomatis akan sulit menggantikan jaringan kredibilitas yang hilang.

Ketahanan masyarakat berarti kemampuan mengenali, menanggapi, dan pulih dari gangguan informasi. Pendekatan ini lebih luas dari menghapus konten. Masyarakat yang tangguh memiliki kanal komunikasi yang telah dikenal, tokoh komunitas yang kredibel, prosedur verifikasi, dan pelatihan yang dilakukan sebelum keadaan darurat. Pada hari pemungutan, sebuah informasi palsu mengenai penutupan tempat memilih perlu diklarifikasi melalui sumber yang warga pahami dan dapat mereka jangkau. Pesan koreksi sebaiknya menyebut informasi yang benar secara langsung, bukan hanya mengulang klaim palsu dalam bentuk yang lebih menarik.

AI dapat membantu menyortir konten yang membutuhkan perhatian, mengidentifikasi kemiripan narasi lintas platform, dan menerjemahkan laporan. Alat tersebut harus memperlakukan hasilnya sebagai petunjuk awal, bukan kesimpulan. Penilaian terhadap pola penyebaran membutuhkan konteks: kapan konten pertama kali muncul, apakah akun saling mengoordinasikan, seberapa banyak konten organik yang mendukungnya, dan apakah kemiripan terjadi karena sumber berita yang sama. Metode dan tingkat keyakinan sebaiknya dicatat. Jika lembaga salah mengidentifikasi aktivitas warga sebagai operasi terkoordinasi, reputasi serta kebebasan berekspresi dapat dirugikan.

Kolaborasi respons insiden dapat mengurangi keterlambatan. Penyelenggara, media, organisasi pemeriksa fakta, platform, dan kelompok masyarakat sipil dapat memiliki protokol berbagi indikator dan bukti, dengan batas privasi yang jelas. Tidak semua data perlu dibuka kepada semua pihak. Bukti yang mengandung identitas pengguna dapat disamarkan; informasi teknis dapat diberikan kepada

auditor yang memenuhi standar keamanan. Keberhasilan kolaborasi harus diukur dari kecepatan dan akurasi koreksi serta perlindungan terhadap ekspresi sah, bukan dari banyaknya takedown.

18. Keamanan pemilu dan batas penggunaan AI

Keamanan pemilu mencakup kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem serta keamanan fisik dan informasi bagi warga. AI dapat memperkuat pertahanan melalui deteksi aktivitas jaringan yang tidak biasa atau pengelompokan laporan. Namun sistem prediktif tidak dapat menggantikan praktik keamanan dasar seperti pembaruan perangkat lunak, autentikasi kuat, pemisahan akses, pencatatan kejadian, pencadangan, dan latihan respons. Dalam organisasi yang tidak memiliki proses keamanan matang, menambahkan AI dapat menciptakan kompleksitas dan titik serang baru tanpa menyelesaikan kelemahan utama.

Penggunaan sistem AI untuk pengawasan pemilih atau pengenalan wajah menimbulkan risiko yang lebih besar. Pemantauan berbasis biometrik dapat menghalangi warga hadir dalam kegiatan politik, salah mengidentifikasi individu, atau menciptakan basis data yang dapat digunakan kembali di luar tujuan pemilu. Kebutuhan untuk menjaga ketertiban tidak dengan sendirinya membenarkan pengawasan massal. Setiap pemanfaatan yang berdampak pada hak harus menunjukkan kebutuhan, proporsionalitas, batas waktu, retensi, akses, dan jalur keberatan. Pada banyak situasi, pengaturan petugas dan pemantauan prosedural yang transparan lebih sesuai daripada pengumpulan biometrik berskala besar.

Risiko keamanan juga hadir pada rantai pasok AI. Model, dataset, API, perangkat lunak, dan layanan cloud dapat berasal dari beberapa vendor. Pembaruan model dapat mengubah hasil tanpa terlihat oleh operator. Kontrak perlu mengatur pemberitahuan perubahan material, lokasi serta pemrosesan data, penanganan kerentanan, dan hak audit. Lembaga harus mengetahui apakah data yang diberikan akan digunakan untuk melatih model eksternal. Bila pemasok gagal atau layanan berhenti, institusi perlu mempunyai rencana pemulihan dan alternatif manual.

Salah satu prinsip penting ialah memisahkan pemantauan keamanan dari pengawasan politik. Tujuan investigasi harus terukur dan terkait insiden tertentu; data warga tidak dikumpulkan secara luas hanya untuk mencari perilaku menyimpang yang belum diketahui. Proses otorisasi dan pencatatan akses

membantu mencegah penyalahgunaan. Setelah insiden, evaluasi perlu dilaksanakan dengan melindungi informasi yang dapat memicu serangan lanjutan tetapi tetap mengungkap apa yang relevan bagi publik. Keamanan dan akuntabilitas bukan tujuan yang saling meniadakan; keduanya perlu dirancang bersama.

19. AI dalam pendidikan pemilih dan pelayanan demokratis

Pendidikan pemilih berperan menjembatani aturan pemilu dengan pengalaman sehari-hari. AI dapat membantu menghasilkan ringkasan prosedur dalam bahasa yang lebih sederhana, menerjemahkan bahan edukasi, dan menjawab pertanyaan rutin. Untuk wilayah dengan keterbatasan akses, asisten berbasis pesan singkat atau suara dapat menjadi alternatif. Namun informasi mengenai syarat memilih, lokasi, waktu, dan prosedur harus bersumber dari kanal resmi dan ditinjau manusia. Sistem harus mengakui ketika tidak yakin, menyertakan rujukan, serta mengarahkan pertanyaan kompleks kepada petugas, bukan memberikan jawaban hukum yang dibuat-buat.

Kualitas layanan demokratis tidak ditentukan oleh keramahan antarmuka saja. Warga perlu menerima jawaban yang tepat, dapat ditindaklanjuti, dan sama bagi semua orang. Chatbot yang menjawab cepat tetapi memberi informasi berbeda untuk bahasa atau kelompok tertentu dapat memperlebar ketidakadilan. Pengujian harus mencakup variasi ejaan, aksen, pertanyaan tidak lengkap, pengguna disabilitas, dan konteks yang ambigu. Pengalaman pengguna sebaiknya dinilai bersama masyarakat yang benar-benar akan memakai layanan, bukan hanya berdasarkan tes internal tim pengembang.

AI juga dapat merangkum aspirasi publik dari konsultasi atau kanal aduan. Ringkasan otomatis membantu mengelola volume masukan, tetapi pendapat minoritas tidak boleh hilang karena frekuensinya rendah. Setiap ringkasan perlu menyatakan bahwa ia merupakan sintesis, menunjukkan tema berbeda dan ketidakpastian, serta memberikan akses pada data sumber yang sudah dianonimkan bila sesuai. Pengambil keputusan harus tetap membaca sampel masukan langsung dan melaporkan bagaimana aspirasi memengaruhi kebijakan. Jika warga tidak melihat tindak lanjut, konsultasi digital berubah menjadi pengumpulan data tanpa partisipasi bermakna.

Kanal digital sebaiknya melengkapi, bukan menggantikan, pelayanan tatap muka dan media konvensional. Tidak semua orang memiliki perangkat, koneksi stabil, atau keyakinan menggunakan layanan otomatis. Prinsip multi-kanal menjaga hak warga agar tetap dapat memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan tanpa bergantung pada aplikasi tertentu. Penggunaan AI dapat mengurangi beban pelayanan selama tersedia alternatif manusia yang mudah diakses, terutama untuk koreksi data, kasus sensitif, dan pengaduan tentang diskriminasi.

20. Regulasi, hak politik, dan tata kelola lintas sektor

Kerangka regulasi yang mengatur AI dalam pemilu harus menghubungkan hukum data, pemilu, kampanye, media, keamanan siber, dan perlindungan konsumen. Aturan terpisah dapat meninggalkan celah ketika suatu praktik berada di antara kategori yang sudah ada. Sebaliknya, satu regulasi yang terlalu luas dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Pemetaan mandat lembaga menjadi langkah awal: lembaga mana yang mengatur iklan, pemrosesan data, hak pilih, disinformasi, pelanggaran kampanye, dan penanganan konten? Prosedur koordinasi dan pertukaran bukti harus jelas sebelum sengketa terjadi.

Hak atas perlindungan data pribadi memiliki arti khusus dalam proses politik karena data dapat mengungkap preferensi, keyakinan, jaringan sosial, dan kerentanan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjadi bagian penting dari dasar hukum Indonesia, termasuk pengaturan hak subjek data terkait keputusan otomatis tertentu. Penerapannya terhadap praktik kampanye dan platform memerlukan penilaian kasus per kasus berdasarkan dasar pemrosesan, tujuan, dampak, dan pengecualian yang berlaku. Pengumpulan data dari sumber yang dapat diakses publik tidak otomatis membenarkan semua bentuk profiling atau penggunaan politik sekunder.

Batas konten yang dilarang harus dirumuskan dengan presisi dan proses yang adil. Pemerintah memiliki kepentingan sah untuk melindungi keselamatan dan kelancaran proses pemilu, tetapi juga berpotensi memiliki kepentingan politik dalam mengendalikan kritik. Aturan perlu memiliki dasar hukum, uji proporsionalitas, alasan tertulis, transparansi tindakan, dan mekanisme banding independen. Platform dapat mengambil tindakan berdasarkan kebijakan internal, tetapi penegakan hukum dan pembatasan ekspresi oleh negara memerlukan standar konstitusional. Kewenangan darurat harus dibatasi waktu dan diawasi.

Pada tingkat internasional, aturan dan praktik platform lintas negara menciptakan tantangan yurisdiksi. Konten dapat dibuat di satu negara, ditargetkan kepada pemilih di negara lain, dan dihosting oleh perusahaan global. Kerja sama lintas batas dapat membantu pertukaran bukti dan pengurangan penyalahgunaan, tetapi harus menjaga kedaulatan hukum dan hak warga. Indonesia perlu terlibat dalam dialog standar yang mendorong transparansi, interoperabilitas penanda konten, serta audit yang dapat dipercaya, sambil memastikan kebijakan tidak hanya menyalin kerangka negara dengan konteks politik dan kapasitas berbeda.

21. Dimensi gender, minoritas, dan keselamatan kandidat

Penyalahgunaan AI dalam politik dapat memiliki dampak yang tidak merata. Perempuan dalam jabatan publik, kelompok minoritas, aktivis, dan jurnalis dapat menjadi sasaran pelecehan, ancaman, atau konten seksual sintetis yang merusak reputasi. Dampaknya bukan hanya pada individu yang diserang; serangan juga dapat membuat kelompok lain menarik diri dari ruang politik. Kebijakan integritas pemilu perlu memperhitungkan efek partisipasi dan keselamatan ini. Pelaporan harus aman, cepat, serta melindungi korban dari pengulangan paparan konten yang merugikan.

Kebijakan moderasi yang tidak peka gender dan budaya dapat menambah masalah. Sistem dapat gagal mengenali pelecehan terselubung atau justru menandai diskusi tentang kekerasan sebagai konten terlarang. Standar evaluasi harus mencakup dampak berbeda terhadap kelompok dan bahasa, dengan keterlibatan organisasi yang memiliki pengalaman langsung. Label dan penurunan distribusi tidak selalu cukup untuk kasus ancaman atau pemerasan. Diperlukan jalur pengamanan, eskalasi ke pihak berwenang jika diperlukan, serta layanan dukungan bagi korban.

Perlindungan terhadap kandidat dan warga tidak boleh digunakan untuk meniadakan kritik atau investigasi. Media harus tetap dapat membahas materi autentik yang relevan bagi kepentingan publik, dan parodi politik harus tetap terlindungi sepanjang tidak menimbulkan penipuan yang berbahaya. Pembedaan perlu melihat niat yang dapat dibuktikan, konteks distribusi, potensi kerugian, dan kepentingan publik. Ketika keputusan moderasi meragukan, alasan dan

mekanisme banding penting agar perlindungan tidak berubah menjadi privilese bagi pemegang kekuasaan.

Kampanye dan platform dapat mengadopsi protokol perlindungan yang secara khusus menangani konten intim sintetis, doxing, ancaman, dan peniruan identitas. Protokol mencakup jalur pelaporan prioritas, pembatasan penyebaran ulang, dokumentasi bukti, serta koordinasi dengan penyedia layanan korban. Pendidikan publik perlu menegaskan bahwa menyebarkan ulang konten untuk mengejek atau "membuktikan" bahwa konten itu palsu tetap dapat memperbesar kerugian. Keselamatan digital adalah syarat partisipasi politik yang setara.

22. Masa depan riset dan evaluasi kebijakan

Riset tentang AI dan pemilu perlu bergerak melampaui hitungan contoh deepfake yang viral. Peneliti perlu mengukur seluruh siklus informasi: produksi, distribusi, paparan, interpretasi, koreksi, dan dampak terhadap partisipasi. Desain penelitian harus membedakan hubungan korelasional dengan efek sebab-akibat. Konten yang sering dibagikan belum tentu mengubah preferensi; survei sikap belum tentu menggambarkan perilaku; dan perilaku online tidak selalu mewakili keputusan di bilik suara. Kombinasi eksperimen yang etis, studi longitudinal, analisis jaringan, wawancara, dan pengamatan lapangan dapat menjelaskan mekanisme secara lebih seimbang.

Indonesia menawarkan konteks penting untuk riset komparatif karena memiliki jumlah pemilih besar, ekosistem platform yang beragam, bahasa berlapis, dan struktur lokal yang tidak seragam. Namun generalisasi memerlukan kehati-hatian. Studi di kota besar dan pengguna platform tertentu tidak otomatis mewakili pemilih nasional. Riset perlu membandingkan wilayah, usia, jenis kelamin, bahasa, tingkat konektivitas, dan posisi sosial, serta memeriksa siapa yang tidak hadir dalam data. Metode, proses pengambilan sampel, serta batasan harus diungkap agar temuan tidak dipakai berlebihan sebagai dasar kebijakan.

Agenda berikutnya mencakup audit penargetan iklan, evaluasi detektor konten sintetis dalam bahasa Indonesia dan daerah, pemetaan ekosistem akun terkoordinasi, dan pengukuran kepercayaan terhadap proses autentikasi. Penelitian juga perlu menguji apakah label konten membantu pengguna atau justru menimbulkan kelelahan label. Dampak sistem pada kelompok yang rentan menjadi prioritas. Peneliti perlu mengembangkan indikator kualitas deliberasi

yang lebih baik daripada jumlah komentar atau interaksi. Akses data platform dan perlindungan privasi harus dirancang agar penelitian independen dapat berlangsung tanpa mengorbankan keselamatan pengguna.

Pembuat kebijakan memerlukan bukti yang dapat diterjemahkan ke dalam keputusan. Setiap rekomendasi sebaiknya menjelaskan masalah yang diatasi, alternatif yang dibandingkan, tingkat kepastian bukti, dan risiko samping. Uji coba terbatas dapat dilakukan sebelum penerapan luas, tetapi harus memiliki kriteria penghentian dan evaluasi publik. Bukti negatif atau temuan bahwa suatu intervensi tidak efektif juga penting agar anggaran tidak terus digunakan pada solusi yang populer namun tidak berdampak. Riset yang kuat menghindari baik optimisme teknologi maupun alarmisme yang tidak didukung bukti.

23. Kerangka pertanyaan untuk menilai setiap sistem AI pemilu

Sebelum suatu sistem digunakan, pembuat keputusan dapat memulai dengan pertanyaan tujuan: masalah apa yang ingin diselesaikan, apakah masalah tersebut telah dibuktikan, dan apakah AI merupakan cara paling tepat? Jika proses manual sudah cukup adil dan efektif, menambah otomatisasi mungkin hanya memindahkan risiko. Jika sistem memang dibutuhkan, lembaga perlu mengidentifikasi kelompok yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Peta dampak harus mencakup pemilih, petugas, kandidat, media, dan penyedia layanan yang mungkin menghadapi kesalahan atau perubahan proses.

Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan data dan performa. Data berasal dari mana, dasar penggunaannya apa, siapa yang tidak tercakup, dan bagaimana ketidakakuratan dideteksi? Keluaran model dapat berbeda pada wilayah atau kelompok bahasa tertentu? Ukuran kinerja yang dipilih sesuai dengan tujuan publik atau hanya mudah dihitung? Berapa tingkat kesalahan yang dapat diterima, dan siapa yang menetapkannya? Pertanyaan ini menyingkap bahwa “akurasi” selalu dihubungkan dengan pilihan nilai dan konsekuensi yang tidak dapat diserahkan kepada tim teknis semata.

Pertanyaan akuntabilitas meliputi siapa pemilik keputusan, siapa yang memberi persetujuan, siapa yang menerima keluhan, serta bagaimana keputusan direvisi. Apakah petugas memiliki pelatihan dan waktu untuk menguji keluaran? Apakah pengguna diberi tahu ketika AI digunakan? Dapatkah warga memperoleh alasan

tanpa harus memahami matematika model? Apakah ada pihak independen yang dapat mengaudit? Sistem yang tidak bisa memberikan jawaban memadai pada pertanyaan tersebut belum siap digunakan pada keputusan yang berpengaruh terhadap hak politik.

Terakhir, setiap sistem perlu memiliki rencana pemantauan dan penghentian. Kapan model diuji ulang, perubahan apa yang memicu penilaian dampak baru, bagaimana insiden dilaporkan, dan siapa dapat menghentikan operasi? Bagaimana data dihapus atau dipindahkan saat kontrak berakhir? Apakah fungsi inti masih berjalan jika koneksi atau layanan vendor gagal? Jawaban atas pertanyaan ini membantu lembaga menyusun keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola yang baik tidak menganggap keberhasilan sebagai keadaan permanen; ia menyiapkan proses untuk mengoreksi, mengganti, atau menghentikan sistem.

24. Nilai demokratis sebagai ukuran penggunaan teknologi

Demokrasi dapat dipahami sebagai tata cara membentuk keputusan bersama sekaligus sebagai tatanan yang menjamin status setara bagi warga. Dari pengertian ini muncul sejumlah ukuran untuk menilai sistem AI: apakah sistem memperluas kesempatan berbicara, apakah pihak yang terdampak dapat meminta alasan, apakah kekuasaan tetap dapat diganti melalui pemilu, apakah kritik dapat disampaikan tanpa rasa takut, dan apakah minoritas tidak dikorbankan hanya demi efisiensi mayoritas. Ukuran tersebut membantu memperjelas mengapa performa teknis tidak cukup. Model yang sangat akurat untuk satu tujuan masih dapat digunakan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip demokrasi bila ia menutup akses atau membuat kebijakan tidak dapat digugat.

Kesetaraan politik mengharuskan agar setiap pemilih mempunyai kedudukan yang sama, tetapi kesamaan formal belum tentu menghasilkan akses yang seimbang. Seseorang yang tidak memiliki telepon pintar mungkin tetap memiliki hak pilih yang sama, tetapi ia lebih sulit menerima perubahan informasi yang disampaikan hanya melalui kanal digital. Warga yang memakai bahasa minoritas dapat secara formal mengakses layanan daring, tetapi gagal memperoleh jawaban yang akurat. Desain AI perlu mengidentifikasi kesenjangan tersebut, menyediakan pilihan saluran, dan mengukur hasil berdasarkan kelompok. Keadilan substantif kadang memerlukan dukungan tambahan untuk memastikan teknologi tidak memperbesar hambatan lama.

Kebebasan berekspresi dan perlindungan dari manipulasi dapat berada dalam tegangan. Pelabelan konten sintetis dapat membantu audiens memahami konteks, namun penghapusan otomatis bisa menghilangkan satire yang sah atau materi dokumentasi yang penting. Sebaliknya, membiarkan konten menipu beredar tanpa tindakan dapat mengganggu hak pemilih memperoleh informasi yang memadai. Pengambilan keputusan harus memperhatikan tingkat kerugian, niat, konteks, dan urgensi. Instruksi palsu mengenai prosedur pemungutan memiliki risiko yang berbeda dari ilustrasi hiperbolis tentang kandidat. Kerangka yang membedakan kategori dan respons akan lebih proporsional daripada aturan yang hanya bertumpu pada keberadaan AI.

Nilai demokratis juga menuntut pluralisme dan deliberasi. Konten yang paling populer bukan selalu konten yang paling bernilai bagi pertimbangan bersama. Sistem yang memberi prioritas pada perhatian jangka pendek dapat mendorong pembicaraan yang penuh konflik tanpa menyediakan ruang bagi argumen substantif. Platform dan lembaga publik dapat menawarkan pilihan untuk melihat keragaman sumber, penjelasan kebijakan, serta diskusi yang terstruktur. Tujuannya bukan membuat semua warga sependapat, melainkan memastikan bahwa mereka dapat mengakses alasan yang beragam dan menilai klaim dengan bukti yang bisa ditelusuri.

Terakhir, legitimasi teknologi memerlukan kemungkinan untuk mengatakan tidak. Lembaga publik harus dapat menolak penggunaan AI ketika manfaat tidak sebanding dengan risikonya, dan warga harus dapat memilih layanan alternatif bila keputusan otomatis berdampak penting. Pembatasan ini tidak identik dengan penolakan inovasi; ia memastikan inovasi bergerak dalam batas mandat publik. Kemampuan menghentikan sistem merupakan bukti bahwa institusi tetap memegang kendali dan tidak menjadikan investasi sebelumnya sebagai alasan untuk terus memakai alat yang merugikan.

25. Perubahan strategi kampanye dan pembiayaan politik

Kampanye modern telah lama menggunakan segmentasi, iklan digital, analitik percakapan, dan produksi konten berbantuan perangkat lunak. AI mempercepat dan memperluas kegiatan tersebut. Kandidat dapat menguji beberapa versi pesan, menyesuaikan materi untuk format platform, dan merespons percakapan dengan

lebih cepat. Perubahan ini menggeser kerja kampanye dari produksi terbatas menuju eksperimen kontinu yang berbasis data. Meskipun demikian, keberadaan perangkat analitik belum tentu berarti strategi berbasis data berhasil. Keputusan politik tetap dipengaruhi oleh reputasi kandidat, organisasi partai, isu lokal, jaringan tatap muka, dan pengalaman warga.

Pemasaran politik berbasis data menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang membiayai infrastruktur dan apakah pengeluaran digital dilaporkan dengan cara yang dapat diawasi. Belanja untuk komputasi awan, data, konsultan, generator konten, dan penempatan iklan dapat tersebar pada banyak pemasok. Jika aturan pelaporan hanya menghitung materi cetak atau iklan tradisional, biaya kampanye digital mungkin sulit dibandingkan. Transparansi perlu mencakup kategori jasa dan pengeluaran yang relevan tanpa mewajibkan pengungkapan informasi pribadi relawan atau strategi komunikasi yang tidak berdampak pada publik.

Perpustakaan iklan politik membantu menyediakan rekam publik yang dapat dicari. Arsip ideal menunjukkan materi lengkap, pihak yang membayar, periode penayangan, wilayah dan rentang audiens, variasi kreatif, serta kategori penargetan. Akses ini bermanfaat bagi pemilih yang ingin membandingkan klaim, jurnalis yang memeriksa konsistensi janji, dan peneliti yang menguji pola penargetan. Arsip tidak harus berarti membuka identitas setiap pengguna yang menerima iklan; pelindungan privasi dapat dijaga melalui pelaporan teragregasi dan kontrol akses untuk analisis sensitif.

AI dapat menurunkan biaya masuk bagi kandidat baru dan organisasi kecil, tetapi dapat pula membuat kampanye besar lebih unggul karena mereka menguasai data, tenaga ahli, dan kapasitas pengujian. Kebijakan persaingan politik perlu memperhatikan konsentrasi sumber daya digital, bukan hanya jumlah iklan. Pelatihan bersama, perangkat sumber terbuka yang aman, akses data agregat yang setara, dan standar teknis terbuka dapat mengurangi ketimpangan. Pada saat yang sama, setiap fasilitas publik bagi kampanye harus bebas dari keberpihakan dan dapat diaudit.

Risiko penting dalam strategi kampanye adalah ketidakkonsistenan pesan. Jika model menghasilkan materi yang berbeda untuk audiens berbeda tanpa proses persetujuan yang ketat, kandidat dapat menyampaikan janji yang bertentangan. Tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan kepada sistem generatif. Partai perlu memiliki proses editorial, persetujuan pejabat kampanye, arsip versi, dan

mekanisme koreksi. Penggunaan AI untuk membuat materi kampanye sebaiknya tercatat secara internal, terutama ketika konten menampilkan orang nyata, memuat klaim faktual, atau membahas isu sensitif.

26. Pengawasan pemilu dan penggunaan analitik

Pengamat pemilu bekerja dengan informasi dari berbagai sumber: observasi di tempat pemungutan, laporan warga, dokumentasi resmi, media, dan komunikasi penyelenggara. AI dapat membantu menyortir laporan berdasarkan lokasi, waktu, dan jenis masalah. Analitik spasial dapat menunjukkan area yang memerlukan verifikasi tambahan, sementara pengenalan teks dapat membantu membaca formulir. Manfaat ini terletak pada prioritisasi sumber daya pengamat, bukan penetapan bahwa suatu pelanggaran benar-benar terjadi. Laporan harus tetap mengandalkan bukti, triangulasi, dan standar pengamatan yang konsisten.

Penggunaan prediksi untuk mengarahkan pengawasan berisiko menciptakan lingkaran umpan balik. Jika model menandai wilayah tertentu sebagai berisiko, lebih banyak petugas dikirim ke sana, sehingga lebih banyak kejadian terdeteksi di wilayah itu. Data baru kemudian membuat wilayah tersebut tampak lebih bermasalah, meskipun wilayah lain kurang teramati. Untuk menghindari bias ini, organisasi pengawas perlu mengukur tingkat cakupan pemeriksaan, membandingkan temuan dengan sampel acak, dan meninjau asumsi model. Prediksi risiko sebaiknya memandu pertanyaan, bukan menggantikan penilaian terhadap kualitas data.

Pengamat dapat memanfaatkan alat analisis konten untuk memetakan narasi yang beredar. Akan tetapi, penghitungan kata kunci tidak selalu mengidentifikasi makna, ironi, konteks budaya, atau perubahan istilah. Narasi yang sama dapat digunakan untuk mendukung atau mengkritik kandidat. Peneliti perlu memberi anotasi manual pada sampel, melaporkan tingkat kesepakatan pengode, dan menjelaskan bagaimana bahasa daerah diproses. Penggunaan model bahasa besar untuk merangkum laporan harus memasukkan pengecekan sumber karena sistem dapat menghilangkan detail atau mengarang hubungan yang tidak ada.

Pengawasan algoritmik terhadap penyelenggara juga harus berhati-hati. Sistem dapat membandingkan jumlah laporan, kecepatan penanganan, atau distribusi layanan untuk mengidentifikasi ketidakwajaran. Namun ketidakwajaran statistik

bukan bukti kesengajaan dan tidak boleh dijadikan dasar untuk menuduh individu. Standar pembuktian hukum tetap berlaku. Pemberitaan harus membedakan antara sinyal untuk pemeriksaan, dugaan, temuan yang terverifikasi, dan putusan berkekuatan hukum. Pembedaan ini melindungi integritas lembaga dan hak orang yang dituduh.

Organisasi masyarakat sipil dapat mengembangkan protokol audit yang bersifat independen dan transparan. Protokol sebaiknya menjelaskan sampel data, cara klasifikasi, batas waktu, metode validasi, dan konflik kepentingan. Data harus dianonimkan jika memungkinkan, dan akses dibatasi ketika publikasi dapat membahayakan pelapor. Keterbukaan metodologis memungkinkan masyarakat memahami mengapa suatu temuan muncul. Kepercayaan pada pengawasan tumbuh ketika prosesnya dapat diuji, bukan hanya ketika kesimpulan sesuai harapan kelompok tertentu.

27. Respons terhadap disinformasi tanpa sensor berlebihan

Kebijakan melawan disinformasi harus menetapkan definisi kerja secara hati-hati. Konten yang salah, konten yang belum terverifikasi, opini, prediksi, satire, dan kesalahan jurnalistik bukan kategori yang sama. Tindakan yang tepat berbeda menurut konsekuensi, niat yang dapat dibuktikan, dan peluang koreksi. Pemerintah harus menghindari definisi yang memberikan kewenangan luas untuk menentukan “kebenaran” politik karena kewenangan tersebut dapat digunakan untuk menekan oposisi. Pendekatan berbasis hak menekankan proses hukum, bukti, proporsionalitas, dan mekanisme banding.

Intervensi memiliki spektrum. Informasi koreksi dapat ditempatkan di dekat klaim; pengguna dapat diberi konteks tambahan; distribusi otomatis dapat diperlambat; sponsor atau asal konten dapat diungkap; iklan dapat dihentikan sementara sambil diperiksa; dan penghapusan dapat digunakan untuk kategori pelanggaran yang jelas serta berisiko tinggi. Respons bertingkat ini menghindari pilihan biner antara membiarkan konten beredar dan menghapusnya secara permanen. Untuk kasus yang belum jelas, tindakan sementara harus memiliki batas waktu dan evaluasi.

Koreksi publik efektif bila sumbernya dipercaya dan mudah diakses. Pernyataan resmi tidak cukup apabila warga menganggap lembaga tidak netral. Kerja sama dengan media, universitas, organisasi profesi, dan tokoh komunitas dapat

memperluas kredibilitas, selama independensi mereka dijaga. Koreksi perlu menjelaskan metode pemeriksaan dan mengakui ketidakpastian. Jika klaim masih sedang diperiksa, lebih baik menyebut statusnya daripada membuat kepastian palsu. Ketika ada bukti baru, pembaruan harus dilakukan secara terbuka.

Penegakan yang tidak konsisten dapat memperburuk tuduhan keberpihakan. Platform perlu melaporkan kategori konten yang ditindak, waktu respons, negara dan bahasa, serta hasil banding dalam bentuk teragregasi. Auditor independen dapat membandingkan penerapan kebijakan pada akun dan kelompok berbeda. Transparansi ini tidak mengharuskan pengungkapan identitas korban atau detail operasional yang membantu pelaku menghindari deteksi. Keterbukaan mengenai prinsip dan statistik memungkinkan publik menilai apakah kebijakan diterapkan secara merata.

Ketika terdapat ancaman langsung terhadap keamanan atau prosedur pemungutan, koordinasi cepat dibutuhkan. Protokol insiden dapat menetapkan siapa yang menerima bukti, siapa memeriksa sumber, siapa menghubungi penyelenggara, dan siapa mengeluarkan klarifikasi. Setiap tindakan darurat harus dicatat dan dievaluasi setelah kejadian. Pengalaman tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki standar tanpa memperluas kewenangan darurat menjadi pengawasan permanen. Tujuan akhirnya adalah memastikan warga memperoleh informasi yang benar sekaligus tetap dapat menyampaikan kritik.

28. Pengadaan dan pengelolaan siklus hidup sistem AI

Keputusan pengadaan sering menentukan nilai dan risiko sistem sebelum model digunakan. Lembaga perlu mendefinisikan kebutuhan publik secara spesifik dan melakukan analisis apakah perangkat otomatis memang diperlukan. Dokumen tender harus menetapkan standar aksesibilitas, keamanan, dokumentasi data, kinerja berdasarkan kelompok, mekanisme audit, penanganan insiden, dan dukungan setelah masa kontrak. Persyaratan ini harus dirancang bersama pengguna layanan, petugas operasional, bagian hukum, dan keamanan informasi. Jika kebutuhan hanya dirumuskan oleh unit teknologi, aspek hak dan dampak sosial mudah terlewat.

Kontrak perlu membagi tanggung jawab secara tegas. Penyedia menjelaskan desain, versi model, pembaruan, keterbatasan, dan syarat layanan; lembaga

pengguna menentukan tujuan sah, kategori data, pengawasan, dan prosedur keputusan. Pengaturan harus mencegah vendor menggunakan data pemilih untuk pelatihan atau tujuan lain tanpa dasar yang sah. Lembaga perlu mendapat hak memeriksa dokumentasi, akses pada log, pemberitahuan perubahan, dan dukungan ketika insiden terjadi. Ketentuan kerahasiaan tidak boleh menghapus hak audit publik untuk sistem yang berdampak pada pemilih.

Penilaian siklus hidup meliputi pemilihan model, validasi, penerapan, pemantauan, pembaruan, penghentian, dan penghapusan data. Model yang akurat pada saat uji coba dapat mengalami penurunan saat bahasa, strategi kampanye, atau platform berubah. Pembaruan data dan model harus melewati uji ulang. Setiap versi perlu dicatat sehingga keputusan dapat direkonstruksi jika terjadi sengketa. Tanpa pencatatan versi, lembaga mungkin tidak dapat menjawab sistem mana yang menghasilkan rekomendasi tertentu pada waktu tertentu.

Ketergantungan pemasok menjadi isu tata kelola. Format tertutup, biaya migrasi, dan kurangnya kemampuan internal dapat membuat lembaga tidak mampu mengganti vendor. Pengadaan sebaiknya mempertimbangkan interoperabilitas, portabilitas data, dokumentasi, pelatihan internal, dan strategi keluar. Model sumber terbuka bukan otomatis aman atau lebih demokratis; ia tetap membutuhkan keamanan, audit, dan dukungan. Yang penting ialah lembaga dapat memahami fungsi, mengontrol akses, dan mempertahankan layanan dasar jika sistem dihentikan.

Setiap proyek AI perlu memiliki ambang penghentian yang disepakati. Misalnya, sistem ditunda bila audit menemukan tingkat kesalahan yang tidak dapat diterima, terjadi kebocoran data, atau operator tidak mampu menjelaskan keputusan berdampak tinggi. Penghentian tidak boleh dianggap kegagalan manajemen bila merupakan cara mencegah kerugian. Evaluasi pasca-proyek dapat mengidentifikasi apakah teknologi memenuhi tujuan, bagaimana beban kerja berubah, dan apakah manfaat sebanding dengan biaya. Pembelajaran organisasi ini mencegah lembaga mengulang keputusan pengadaan yang tidak efektif.

29. Faktor manusia dalam keputusan berbantuan AI

Keputusan berbantuan AI menggabungkan keluaran komputasional dengan penilaian manusia. Kehadiran manusia tidak selalu menghilangkan bias; petugas

dapat memberi bobot berlebihan pada skor karena menganggap sistem objektif, atau mengabaikan rekomendasi yang sebenarnya lebih akurat karena prasangka pribadi. Efek ini bergantung pada pelatihan, beban kerja, budaya organisasi, dan kejelasan kewenangan. Karena itu, evaluasi sistem harus memeriksa interaksi manusia dan mesin, tidak hanya performa model secara terpisah.

Pengawasan bermakna memerlukan kompetensi yang sesuai. Petugas harus memahami bahwa model menghasilkan estimasi berdasarkan data, bukan fakta pasti. Mereka perlu mampu menanyakan dasar rekomendasi, mengenali kasus di luar cakupan, dan mencatat alasan ketika mengambil keputusan berbeda. Organisasi harus menyediakan waktu yang cukup untuk pemeriksaan; target pemrosesan yang terlalu tinggi dapat membuat petugas menyetujui semua keluaran secara mekanis. Pelatihan satu kali tidak cukup bila model dan prosedur terus berubah.

Antarmuka sistem dapat mendorong kepatuhan atau pemeriksaan. Jika hanya menampilkan skor tunggal dengan warna merah atau hijau, pengguna cenderung menganggap keputusan biner. Antarmuka yang lebih baik memperlihatkan sumber data, rentang ketidakpastian, informasi yang hilang, dan konsekuensi yang mungkin. Penjelasan perlu disesuaikan dengan tugas; petugas layanan membutuhkan detail tindakan, sedangkan warga membutuhkan alasan yang relevan untuk haknya. Desain antarmuka juga sebaiknya mencegah pengambilan keputusan penting hanya melalui klik cepat tanpa konfirmasi.

Organisasi harus menyediakan jalur bagi staf untuk melaporkan keluaran yang bermasalah tanpa takut dihukum. Petugas lapangan sering menemukan konteks yang tidak tertangkap data pusat. Jika temuan tersebut tidak dapat disampaikan atau diintegrasikan, sistem akan mengulang kesalahan yang sama. Forum pembelajaran, prosedur eskalasi, dan dokumentasi contoh kesalahan membantu memperbaiki model dan aturan. Umpan balik staf harus disandingkan dengan bukti dan dilindungi dari tekanan politik.

Penggunaan AI juga dapat mengubah identitas profesional petugas. Jika peran mereka direduksi menjadi operator rekomendasi, keahlian publik yang dibangun melalui pengalaman dan interaksi warga dapat terdevaluasi. Sebaliknya, teknologi dapat memperkuat profesionalisme bila mengambil tugas rutin dan memberi petugas lebih banyak waktu untuk kasus yang memerlukan empati, penjelasan,

dan penilaian kontekstual. Implementasi perlu melibatkan pekerja, mengidentifikasi perubahan kompetensi, dan memastikan keputusan tetap berada pada individu yang memiliki mandat serta pertanggungjawaban.

30. Ukuran kualitas demokrasi dalam lingkungan AI

Ukuran kualitas pemilu perlu melihat proses dari perspektif warga. Apakah informasi dasar tersedia sebelum pemungutan? Apakah pertanyaan publik dijawab tepat waktu? Apakah kelompok beragam dapat menyampaikan kepentingan? Apakah iklan politik dapat diketahui sponsornya? Apakah laporan pelanggaran diperiksa dengan standar yang sama? Indikator tersebut melengkapi ukuran teknis dan membantu menilai apakah sistem mendorong kesetaraan dan partisipasi. Survei kepercayaan saja tidak cukup karena tingkat kepercayaan dapat dipengaruhi identitas partisan; ia perlu dipadukan dengan audit proses dan pengalaman layanan.

Indikator akses dapat mencakup ketepatan informasi menurut bahasa, tingkat penyelesaian pertanyaan, waktu tunggu, penggunaan kanal luring, dan pengalaman penyandang disabilitas. Indikator akuntabilitas dapat mencakup jumlah sistem yang terdaftar, kelengkapan penilaian dampak, hasil audit, pengaduan yang diselesaikan, dan waktu koreksi. Indikator integritas informasi dapat menilai transparansi sponsor, kemudahan penelusuran arsip iklan, respons atas konten yang membahayakan prosedur, dan kualitas verifikasi. Setiap metrik perlu menyertakan metodologi serta keterbatasan.

Pengukuran harus menghindari target yang mendorong perilaku merugikan. Jika petugas dinilai hanya berdasarkan jumlah konten ditindak, mereka dapat menghapus materi secara berlebihan. Jika kampanye mengejar keterlibatan, materi provokatif mungkin lebih diutamakan daripada penjelasan program. Jika penyelenggara hanya mengejar kecepatan respons, jawaban belum terverifikasi dapat disebarkan. Metrik perlu diseimbangkan dan ditinjau secara berkala agar tidak mengubah sarana menjadi tujuan.

Perbandingan antarpemilu harus memperhatikan perubahan konteks. Jumlah deepfake, misalnya, tidak dapat dibandingkan tanpa metode deteksi yang stabil dan definisi yang konsisten. Penurunan jumlah laporan dapat berarti risiko turun atau kanal pelaporan melemah. Evaluasi idealnya menggabungkan tren, studi kasus, wawancara, dan pengujian teknis. Data terbuka yang aman membantu

akademisi memeriksa kesimpulan lembaga, tetapi anonimisasi harus menghindari identifikasi ulang warga.

Keberhasilan demokratis pada akhirnya tidak hanya diukur dari apakah pemilu terselenggara, tetapi apakah warga dapat menerima hasil melalui proses yang dipandang adil, walau mereka tidak menyukai pemenangnya. Indikator legitimasi harus mengamati alasan penerimaan dan penolakan, pengalaman kelompok berbeda, serta kemampuan institusi merespons kritik. Tujuannya bukan menghapus ketidakpercayaan secara artifisial, melainkan memastikan bahwa kritik berhadapan dengan bukti dan saluran yang dipercaya. AI yang baik mendukung proses itu dengan informasi yang dapat diuji.

31. Rekomendasi kebijakan bertahap

Pada tahap jangka pendek, lembaga pemilu dan partai dapat menginventarisasi penggunaan AI, menetapkan protokol pemakaian AI generatif, dan membangun kanal klarifikasi konten yang mudah ditemukan. Platform dapat memperbaiki label konten sintetis, arsip iklan politik, dan kanal komunikasi insiden dalam bahasa Indonesia. Organisasi media serta pemeriksa fakta dapat menyepakati prinsip dokumentasi dan standar koreksi. Langkah awal ini tidak memerlukan satu undang-undang baru untuk seluruh persoalan, tetapi memerlukan pembagian tanggung jawab dan pelaporan yang teratur.

Pada tahap menengah, perlu disusun standar penilaian dampak untuk sistem AI yang memengaruhi hak politik atau layanan pemilu. Standar mencakup inventaris sistem, konsultasi publik, pengujian kelompok, audit independen, transparansi vendor, perlindungan data, dan mekanisme keberatan. Badan pengawas perlu memiliki kapasitas teknis dan hukum untuk memeriksa sistem. Perguruan tinggi dapat membantu membentuk pusat pengujian independen dengan aturan konflik kepentingan serta akses data yang aman.

Pada tahap jangka panjang, Indonesia dapat membangun ekosistem kapasitas publik yang tidak bergantung sepenuhnya pada perusahaan besar. Ini mencakup keahlian AI untuk penyelenggara dan badan pengawas, penelitian bahasa daerah, infrastruktur arsip iklan, mekanisme koordinasi lintas institusi, dan program literasi yang berkelanjutan. Investasi tersebut harus diikuti tata kelola yang terbuka dan evaluasi periodik. Kapasitas publik memungkinkan negara

bernegosiasi lebih seimbang dengan penyedia teknologi dan menyusun kebijakan berdasarkan pengetahuan lokal.

Kebijakan perlu menerapkan prinsip proporsionalitas. Penggunaan AI administratif berisiko rendah dapat diatur melalui standar mutu dan perlindungan dasar. Sistem yang memproses data sensitif atau memengaruhi hak harus melalui pengawasan lebih ketat. Konten politik sintetis yang jelas bersifat parodi tidak harus diperlakukan sama dengan rekaman palsu yang memberi instruksi prosedural. Pendekatan berbasis konteks menghindari pembatasan yang berlebihan sekaligus memungkinkan tindakan yang cepat terhadap risiko nyata.

Semua rekomendasi tersebut membutuhkan pembiayaan, pengelola, dan jadwal implementasi yang jelas. Pemerintah dapat menetapkan indikator kemajuan, meminta laporan berkala, dan membuka ringkasan hasil kepada publik. Keterlibatan masyarakat sipil tidak boleh hanya terjadi setelah kebijakan selesai; konsultasi pada tahap perumusan membantu menemukan dampak yang tidak terlihat oleh pembuat sistem. Dengan demikian, tata kelola AI tidak berhenti pada prinsip etika umum, melainkan diterjemahkan menjadi prosedur yang dapat diperiksa dan dievaluasi.

32. Partisipasi warga dan deliberasi berbantuan AI

Partisipasi politik tidak berakhir pada pemberian suara. Warga ikut membentuk agenda melalui diskusi, konsultasi, organisasi masyarakat, petisi, dan pengawasan kebijakan. AI dapat membantu mengelola masukan dalam jumlah besar dengan mengelompokkan tema, mengidentifikasi pertanyaan berulang, atau menyediakan ringkasan berbagai pandangan. Kegunaan ini signifikan ketika lembaga menerima ribuan tanggapan, tetapi pengelompokan otomatis dapat menghapus nuansa dan menyatukan argumen yang berbeda. Karena itu, ringkasan harus diperlakukan sebagai alat bantu, dilengkapi metode, sampel kutipan anonim, dan penjelasan tentang pandangan yang tidak masuk kategori dominan.

Sistem deliberasi digital dapat memberi peserta akses cepat pada latar isu, konsekuensi kebijakan, dan argumen pro-kontra. Asisten AI dapat membantu menjelaskan istilah dan mengajukan pertanyaan yang mendorong refleksi. Namun sistem tidak sepatutnya berperan sebagai moderator yang tidak terlihat dan menentukan pandangan mana yang dianggap rasional. Tujuan deliberasi adalah pertukaran alasan antarwarga, bukan pencapaian konsensus yang dibuat

algoritma. Moderator manusia tetap penting untuk menegakkan aturan, melindungi peserta dari pelecehan, dan memastikan peserta minoritas didengar.

Penerapan deliberasi digital harus memikirkan representasi. Forum daring dapat didominasi kelompok yang memiliki waktu, keterampilan menulis, dan konektivitas. Sistem dapat membantu membuat ringkasan yang mudah diakses, tetapi tidak dapat menggantikan upaya menjangkau warga yang tidak hadir. Kombinasi diskusi tatap muka, pertemuan komunitas, telepon, formulir sederhana, serta platform digital menjaga partisipasi lebih luas. Penggunaan AI harus dievaluasi berdasarkan keragaman suara yang masuk dan pengaruh nyata masukan terhadap keputusan.

Warga juga perlu mengetahui ketika diskusi melibatkan AI. Jika chatbot mengajukan pertanyaan atau menyusun sintesis, peran tersebut harus dinyatakan. Peserta harus dapat meminta ringkasan alternatif dan mengakses transkrip yang telah dianonimkan sesuai hukum. Penjelasan ini mencegah kesan bahwa pandangan tertentu datang dari banyak peserta padahal merupakan hasil parafrase model. Keterbukaan membantu publik membedakan antara suara manusia dan alat yang merangkum suara tersebut.

Keberhasilan partisipasi berbantuan AI bergantung pada kepercayaan dan tindak lanjut. Lembaga perlu melaporkan tema yang diterima, alasan menerima atau menolak usulan, dan perubahan yang terjadi. Bila tidak ada tindak lanjut, teknologi hanya mempercepat penyerapan opini ke dalam basis data tanpa memperkuat pengaruh warga. Partisipasi yang bermakna mempertahankan hubungan dua arah: pemerintah mendengar, menjelaskan, dan menunjukkan bagaimana keputusan dibentuk.

33. Pelajaran perbandingan untuk negara demokrasi majemuk

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa dampak AI dalam pemilu berbeda menurut aturan, infrastruktur media, tingkat kepercayaan, struktur partai, dan kapasitas administrasi. Temuan dari satu negara tidak dapat langsung dipindahkan ke negara lain. Sebagai contoh, studi besar tentang amplifikasi konten politik di Twitter menemukan pola tertentu pada tujuh negara, tetapi hasil tersebut berhubungan dengan platform, periode, dan metode khusus yang

digunakan (Huszár et al., 2022). Ia tidak membuktikan bahwa semua platform atau sistem rekomendasi menunjukkan efek identik.

Perbandingan yang produktif mengidentifikasi mekanisme yang dapat diuji: apakah iklan politik tersembunyi, apakah bahasa lokal kurang dimoderasi, apakah pihak tertentu menguasai infrastruktur data, atau apakah lembaga tidak memiliki prosedur koreksi. Negara dengan lembaga pengawas yang kuat mungkin mampu mengaudit vendor; negara yang sumber dayanya terbatas mungkin menghadapi ketergantungan lebih besar pada perusahaan. Pertanyaan komparatif perlu membedakan kondisi tersebut dari efek teknis AI itu sendiri.

Negara-negara Global South sering menghadapi ketimpangan infrastruktur dan sumber daya, tetapi juga memiliki inovasi sosial yang berakar pada jaringan lokal. Pendekatan yang hanya mengadopsi standar negara kaya dapat mengabaikan ragam bahasa, akses internet, dan pola penggunaan platform. Namun konteks khusus bukan alasan untuk menurunkan standar hak. Ia menjadi alasan untuk membangun implementasi yang sesuai, termasuk saluran luring, audit bahasa, aturan data yang jelas, serta dukungan pada media lokal dan organisasi sipil.

Kerja sama regional dapat bermanfaat untuk berbagi indikator ancaman dan praktik respons. Namun pertukaran data lintas batas perlu dikendalikan oleh dasar hukum, batas tujuan, keamanan, dan pengawasan. Informasi tentang akun atau warga tidak boleh dibagikan tanpa perlindungan. Forum kerja sama dapat mengembangkan format label konten, protokol penyimpanan bukti, dan standar transparansi yang kompatibel, sambil membiarkan tiap negara menegakkan perlindungan hak sesuai kerangka hukumnya.

Pelajaran utama dari perbandingan bukan mencari satu model regulasi yang sempurna, melainkan membangun proses belajar. Negara dapat menguji kebijakan secara terbatas, mengukur hasilnya, mendokumentasikan efek samping, dan berbagi pengalaman. Implementasi yang baik harus dapat diperbaiki ketika bukti baru muncul. Fleksibilitas ini tidak berarti ketidakpastian nilai; kebebasan, kesetaraan, privasi, dan akuntabilitas tetap menjadi batas yang tidak berubah.

34. Tanggung jawab ketika sistem gagal

Kegagalan AI dalam proses pemilu dapat berupa kesalahan prediksi, konten palsu, kebocoran data, diskriminasi, gangguan layanan, atau keputusan yang tidak dapat dijelaskan. Masing-masing membutuhkan pemulihan berbeda. Jika sistem

menerjemahkan informasi prosedural secara keliru, lembaga harus mengeluarkan koreksi melalui kanal yang sama luasnya dan memastikan warga terdampak memperoleh jawaban. Jika data bocor, perlu ada pemberitahuan, perlindungan terhadap risiko lanjutan, investigasi, dan pertanggungjawaban sesuai hukum. Jika sistem menandai warga atau kandidat secara salah, reputasi dan hak mereka harus dipulihkan.

Pertanggungjawaban harus didesain sebelum insiden. Lembaga perlu menetapkan pemilik risiko, jalur eskalasi, kewajiban pelaporan vendor, dan kontak publik. Catatan tentang versi model, data uji, perubahan, dan keputusan manusia membantu mengidentifikasi sebab. Tanpa jejak ini, pihak yang terdampak dapat dipaksa membuktikan sesuatu yang tidak mungkin mereka akses. Ketimpangan informasi menjadi hambatan untuk memperoleh keadilan, sehingga mekanisme audit dan penjelasan perlu tersedia secara proaktif.

Penggunaan AI tidak menghapus tanggung jawab hukum organisasi. Petugas tidak dapat beralasan bahwa "mesin yang memutuskan" jika mereka menggunakan rekomendasi dalam kewenangan resmi. Vendor tidak dapat menyatakan bahwa sistem hanyalah perangkat netral apabila kontrak dan desainnya memungkinkan dampak yang dapat diperkirakan. Platform memiliki kewajiban terkait proses dan kebijakan yang mereka kendalikan. Pengaturan peran yang jelas membantu mencegah tanggung jawab saling dilemparkan.

Pemulihan bukan hanya kompensasi finansial. Ia dapat mencakup koreksi data, pemulihan akses, penghapusan profil yang tidak sah, peninjauan ulang keputusan, permintaan maaf, sanksi administratif, atau perubahan prosedur. Bentuk pemulihan harus sesuai jenis kerugian dan dapat diminta tanpa biaya yang tidak wajar. Evaluasi publik setelah insiden memberi kesempatan bagi warga untuk mengetahui apakah penyebab sistemik telah diperbaiki.

Budaya organisasi yang mengakui kesalahan akan lebih tangguh daripada budaya yang selalu berusaha mempertahankan citra bahwa sistem otomatis tidak pernah keliru. Pelaporan internal yang aman memungkinkan pegawai mengidentifikasi kegagalan sebelum meluas. Pengalaman insiden dapat menjadi bahan pelatihan dan perbaikan standar. Transparansi bukan sekadar kewajiban eksternal; ia mempercepat pembelajaran dan mengurangi peluang kegagalan serupa di masa depan.

35. Tahapan kesiapan institusi menjelang pemilu

Persiapan perlu dimulai jauh sebelum masa kampanye. Pada tahap awal, lembaga memetakan sistem, pemasok, alur data, dan keputusan yang dibantu AI. Inventarisasi harus mencakup perangkat yang dibeli unit kerja dan layanan cloud yang digunakan untuk analisis atau komunikasi. Organisasi kemudian menentukan sistem mana yang menyentuh hak politik, informasi publik, atau keamanan. Penilaian ini memberi waktu untuk memperbaiki kontrak, mengevaluasi alternatif, atau membatalkan sistem yang tidak dapat diawasi.

Tahap berikutnya adalah pengujian dan konsultasi. Sistem diuji pada contoh data representatif, bahasa yang beragam, kondisi jaringan, serta skenario penyalahgunaan. Hasil pengujian dan langkah mitigasi dibahas dengan lembaga pengawas, kelompok masyarakat sipil, peneliti, dan komunitas terdampak. Konsultasi bukan hanya pencarian persetujuan; ia dapat mengidentifikasi dampak yang tidak terpikirkan oleh tim pengembang. Keputusan untuk menerapkan tetap harus berdasarkan bukti dan mandat hukum.

Pada masa kampanye, pemantauan perlu dilakukan dengan protokol yang konsisten. Tim respons insiden mencatat laporan, memverifikasi bukti, menghubungi pihak yang bertanggung jawab, dan mengomunikasikan temuan. Saluran komunikasi dengan penyedia platform, media, dan penegak hukum sebaiknya telah diuji. Pengelolaan data dilakukan secara aman dan hanya sejauh diperlukan. Perubahan kebijakan platform atau model selama periode kritis sebaiknya dicatat untuk evaluasi.

Pada hari pemungutan dan penghitungan, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting. Informasi prosedur harus berasal dari sumber yang dapat dikonfirmasi. Sistem analitik dapat membantu memprioritaskan laporan tetapi tidak menentukan hasil. Jika terjadi gangguan jaringan, harus ada prosedur manual yang jelas. Petugas perlu memiliki panduan mengenai kapan harus menghentikan sistem dan beralih ke jalur cadangan. Komunikasi tentang status sistem mengurangi ruang bagi rumor.

Sesudah pemilu, evaluasi dilakukan terbuka. Lembaga menilai kinerja, distribusi kesalahan, insiden, pengaduan, beban petugas, biaya, dan dampak terhadap kepercayaan. Temuan yang dapat dibagikan sebaiknya diterbitkan dalam laporan. Perubahan prosedur untuk pemilu berikutnya dibuat berdasarkan data dan

konsultasi. Siklus kesiapan ini menjadikan tata kelola AI sebagai kapasitas berkelanjutan, bukan proyek darurat yang muncul hanya ketika konten viral.

36. Kesimpulan tambahan: pilihan politik di balik desain teknis

Pilihan desain teknologi selalu mengandung asumsi tentang siapa yang perlu dilihat, masalah apa yang dianggap penting, dan kesalahan mana yang dapat diterima. Sistem yang mengutamakan kecepatan dapat mengorbankan pemeriksaan; sistem yang memprioritaskan keamanan dapat membatasi akses; sistem yang mengejar keterlibatan dapat mendorong konten sensasional. Karena itu, keputusan tentang parameter dan metrik memerlukan perdebatan publik ketika sistem memengaruhi pemilu. Keahlian teknis penting, tetapi keputusan tentang hak dan risiko merupakan persoalan politik yang harus memiliki mandat demokratis.

Keterbukaan terhadap kritik merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Jika suatu sistem memiliki bias atau tidak efektif, pengungkapan memungkinkan perbaikan sebelum dampaknya meluas. Lembaga yang menutup informasi demi menghindari ketidaknyamanan berisiko menciptakan kejutan dan krisis reputasi. Sebaliknya, keterbukaan yang terkelola dapat menunjukkan bagaimana pengawasan dilakukan, data dilindungi, dan kesalahan diperbaiki. Informasi perlu disajikan pada tingkat yang aman dan bermakna bagi warga.

Kepercayaan bukan hasil kampanye komunikasi institusi, melainkan hasil pengalaman warga menghadapi lembaga. Teknologi dapat meningkatkan pengalaman itu dengan respons cepat, informasi yang mudah dimengerti, serta layanan yang inklusif. Ia dapat merusaknya jika keputusan terasa sewenang-wenang, data dipakai tanpa sepengetahuan, atau konten palsu menyebar lebih cepat daripada koreksi. Pembangunan kepercayaan memerlukan integritas kerja dan konsistensi lintas lembaga.

Pemilu masa depan kemungkinan akan memakai AI lebih intensif, baik secara resmi maupun informal. Pertanyaannya bukan apakah teknologi akan hadir, melainkan bagaimana masyarakat mengarahkan penggunaannya dan mengawasi konsekuensinya. Standar yang kokoh, kapasitas publik, pers bebas, partisipasi warga, dan penelitian independen akan menentukan apakah AI menjadi alat yang

memperkuat demokrasi. Tanpa unsur tersebut, efisiensi dapat menutupi konsentrasi kuasa dan manipulasi yang sulit dilihat.

Pada akhirnya, pemilih harus tetap menjadi pusat proses demokratis. AI dapat membantu penyelenggara bekerja, kandidat berkomunikasi, dan warga memahami persoalan; tetapi keputusan politik tidak dapat didelegasikan kepada optimasi statistik. Kedaulatan warga menuntut ruang bagi pertimbangan, pilihan, koreksi, serta pertanggungjawaban. Pemilu yang baik bukan pemilu yang paling otomatis, melainkan pemilu yang membuat otoritas dapat diuji dan suara masyarakat dihormati.

37. Peran jurnalisme dan ruang media lokal

Jurnalisme membantu warga membedakan klaim, fakta, dan kepentingan politik. Dalam lingkungan AI, media dapat memeriksa asal konten, menguji pernyataan kandidat, dan menerangkan ketidakpastian. Namun tekanan untuk menerbitkan cepat dapat membuat redaksi mengandalkan ringkasan otomatis atau menyebarkan ulang konten viral sebelum verifikasi. Kebijakan editorial perlu menetapkan kapan alat generatif boleh digunakan, bagaimana proses pengecekan dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab atas materi yang diterbitkan. Keterbukaan terhadap penggunaan AI juga membantu pembaca memahami kontribusi manusia dan mesin.

Media lokal memiliki kedekatan dengan isu dan bahasa komunitas, tetapi sering kekurangan sumber daya untuk menghadapi volume konten sintetis. Dukungan pada pelatihan verifikasi, akses terhadap ahli, dan kolaborasi antarredaksi dapat memperkuat kemampuan tersebut. Pusat sumber terbuka dapat menyediakan panduan autentikasi dan kontak untuk klarifikasi, tanpa menjadikan redaksi bergantung pada satu lembaga. Kemitraan harus tetap menjaga independensi editorial serta kerahasiaan sumber.

Organisasi berita dapat mengembangkan arsip kebijakan dan klaim kampanye yang dapat ditelusuri dari waktu ke waktu. Arsip membantu memeriksa konsistensi pesan dan memberi konteks terhadap potongan video yang beredar. Penyajian koreksi secara menonjol menjaga akuntabilitas. Media juga perlu menghindari dikotomi palsu yang menyamakan semua klaim atau memberi ruang yang sama kepada bukti kuat dan konspirasi tanpa dasar. Keseimbangan jurnalistik berarti proporsional terhadap kualitas bukti.

AI dapat membantu transkripsi, pengelompokan dokumen, dan pencarian data untuk investigasi. Penerapan itu bermanfaat jika wartawan memverifikasi keluaran dan melindungi dokumen rahasia. Sistem generatif dapat merangkum dengan menghilangkan kutipan penting atau mengarang sumber, sehingga referensi harus diperiksa satu per satu. Redaksi perlu menyimpan catatan penggunaan alat pada pekerjaan sensitif dan tidak memasukkan data narasumber ke sistem eksternal tanpa pengamanan dan dasar yang sesuai.

Keberagaman media merupakan prasyarat bagi ruang informasi yang tahan terhadap dominasi narasi tunggal. AI dapat memperluas jangkauan organisasi berita melalui format audio, terjemahan, dan ringkasan; namun ekonomi platform dapat mengarahkan perhatian kepada konten berbiaya rendah yang memicu respons emosional. Dukungan kebijakan terhadap media independen, akses informasi publik, dan pelatihan jurnalisme lokal sama pentingnya dengan deteksi konten palsu. Infrastruktur sosial ini menjaga ruang publik tetap plural.

38. Metode penilaian bukti dan batas kesimpulan

Kajian mengenai AI pemilu perlu menjelaskan jenis bukti yang mendasari setiap klaim. Pengamatan konten dapat menunjukkan bahwa materi sintetis beredar, tetapi tidak menunjukkan berapa banyak pemilih melihat atau mempercayainya. Survei dapat menilai persepsi tetapi dipengaruhi ingatan dan keinginan responden untuk memberi jawaban yang dapat diterima. Eksperimen dapat menguji efek pesan dalam kondisi terkendali, tetapi hasilnya mungkin tidak berlaku di lingkungan kampanye nyata. Analisis jaringan dapat menemukan koordinasi yang mungkin, namun pola aktivitas serupa juga dapat muncul secara organik.

Peneliti harus membedakan tingkat analisis: konten, akun, kampanye, audiens, institusi, dan hasil pemilu. Temuan pada satu tingkat tidak otomatis menjelaskan tingkat lainnya. Misalnya, bukti bahwa akun otomatis meningkatkan penyebaran sebuah tagar tidak cukup untuk menyimpulkan perubahan preferensi pemilih. Untuk menguji pengaruh terhadap perilaku, diperlukan desain yang memperhitungkan paparan, karakteristik awal, faktor lain, serta perbandingan yang masuk akal. Dalam banyak kasus, data yang tersedia belum memungkinkan estimasi kausal yang kuat.

Analisis AI generatif perlu mencatat versi sistem, waktu akses, prompt, pengaturan, dan karakter data. Model berubah, sehingga hasil uji dari satu versi belum tentu berlaku pada versi berikutnya. Dataset evaluasi harus dilindungi dari kontaminasi dan harus mencakup bahasa serta gaya yang relevan. Peneliti perlu menyebut tingkat kesalahan dan ketidakpastian, bukan hanya demonstrasi kasus yang paling dramatis. Pengungkapan metode membantu pihak lain mereplikasi hasil dan menguji apakah kesimpulan bertahan di konteks berbeda.

Etika penelitian sangat penting karena contoh disinformasi dapat memperbesar jangkauan konten merugikan. Publikasi tidak seharusnya mencantumkan identitas korban atau instruksi yang memudahkan peniruan. Data akun harus diperlakukan sesuai aturan privasi dan persetujuan, serta hasil disajikan pada tingkat agregat bila mungkin. Peneliti dapat melibatkan komite etik dan pemangku kepentingan lokal untuk menilai risiko. Keamanan subjek penelitian dan kebebasan akademik dapat dijaga secara bersamaan melalui protokol yang proporsional.

Kesimpulan kebijakan perlu mengikuti bobot bukti. Bila bukti menunjukkan adanya risiko tetapi belum mengukur dampaknya, kebijakan dapat fokus pada transparansi dan pemantauan sambil menyiapkan evaluasi. Bila kerugian langsung dan terukur terjadi, intervensi yang lebih kuat mungkin diperlukan. Pendekatan adaptif memungkinkan respons bertahap tanpa mengabaikan ancaman. Dengan penalaran yang tertib, diskusi publik dapat menghindari klaim bahwa AI akan otomatis menentukan pemilu maupun anggapan bahwa risiko tidak penting karena belum terbukti mengubah hasil.

39. Penutup: demokrasi sebagai kemampuan kolektif mengoreksi

AI dalam pemilu bukan hanya soal teknologi yang lebih canggih, melainkan soal siapa yang dapat mengarahkan perhatian dan memengaruhi pilihan. Efisiensi administrasi, produksi pesan murah, dan pemrosesan data dalam skala besar akan terus menarik aktor politik. Dorongan ini perlu diseimbangkan dengan hak atas informasi, privasi, kompetisi yang adil, dan kemampuan warga untuk meminta pertanggungjawaban. Ketika sistem membantu administrasi, manfaat harus dapat dibuktikan; ketika sistem memengaruhi komunikasi, sponsor dan konteksnya harus terlihat; ketika sistem membuat kesalahan, jalur koreksi harus berfungsi.

Demokrasi tidak menuntut proses tanpa teknologi. Ia menuntut teknologi yang tunduk pada aturan yang dapat diperdebatkan dan diterapkan secara adil. Penerapan yang sah memiliki tujuan terbatas, data yang proporsional, pengawasan manusia, audit yang independen, dan mekanisme keberatan. Aturan harus cukup kuat untuk mengatasi manipulasi dan cukup presisi untuk menjaga kritik serta satire. Kombinasi ini memerlukan kerja bersama antara lembaga publik, partai, platform, media, universitas, dan warga.

Kepercayaan yang tahan lama lahir dari konsistensi prosedur, bukan dari janji bahwa AI bebas dari kesalahan. Organisasi yang mengakui keterbatasan, menjelaskan keputusan, dan memulihkan hak menunjukkan bahwa ia dapat dikoreksi. Masyarakat yang memiliki akses informasi dan kapasitas verifikasi dapat menguji klaim tanpa harus menerima satu otoritas secara buta. Dalam pengertian ini, demokrasi merupakan kemampuan kolektif untuk mengoreksi kekuasaan, termasuk kekuasaan yang bekerja melalui model dan infrastruktur digital.

Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk membangun praktik yang kontekstual dan menjadi rujukan bagi masyarakat majemuk lainnya. Pengembangan kemampuan bahasa lokal, tata kelola data yang berpijak pada hukum, partisipasi lintas wilayah, dan pengawasan publik dapat membentuk model yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Investasi harus diarahkan pada kapasitas institusi dan masyarakat, bukan hanya aplikasi. Pemilu adalah layanan publik sekaligus hak konstitusional, sehingga keberhasilannya tidak boleh diukur semata dari kecepatan atau skala otomatisasi.

Pilihan terakhir tetap bersifat politik: apakah AI digunakan untuk membuat pemilih lebih mudah memahami dan ikut menentukan masa depan, atau untuk mengatur perilaku mereka tanpa keterlihatan. Bila teknologi memperluas alasan, akses, dan akuntabilitas, ia dapat memperkuat demokrasi. Bila ia memusatkan data dan mengurangi kemampuan publik untuk memeriksa, ia menggerus fondasinya. Prinsip yang perlu dijaga sederhana: suara warga tidak boleh berubah menjadi sekadar variabel optimasi. Warga adalah pemilik kedaulatan, dan sistem AI harus bekerja di bawah mandat serta pengawasan mereka.

40. Kepemimpinan politik dan tanggung jawab digital

Pemimpin politik memiliki tanggung jawab untuk mencontohkan penggunaan teknologi yang jujur. Mereka dapat menjelaskan kapan materi dibuat atau diubah dengan AI, mengoreksi klaim yang keliru, dan menghindari penggunaan data pribadi yang tidak diperlukan. Keputusan semacam ini memberi sinyal kepada organisasi kampanye dan pendukung bahwa daya persuasi tidak membenarkan segala cara. Integritas kepemimpinan semakin penting ketika publik kesulitan membedakan rekaman asli dan sintetis. Sikap terbuka memberi ruang bagi kritik yang berbasis bukti dan mengurangi insentif untuk menyangkal semua dokumentasi sebagai palsu. Kepercayaan tidak dapat dipaksakan, tetapi pemimpin dapat memperkuat kondisi yang memungkinkan publik menilainya secara adil.

Partai politik dapat menjadikan tata kelola AI bagian dari etika organisasi, bukan sekadar kepatuhan pada peraturan eksternal. Pengurus menetapkan pejabat yang menyetujui materi, mengelola data, dan menanggapi pengaduan; anggota mendapat pelatihan tentang privasi, peniruan identitas, dan verifikasi. Evaluasi internal harus memeriksa apakah sistem memperlakukan kelompok secara tidak adil atau menghasilkan pesan yang menyimpang dari program resmi. Catatan keputusan membantu organisasi mengetahui bagaimana teknologi digunakan dan siapa yang bertanggung jawab. Prosedur ini juga melindungi kandidat dan relawan dari risiko hukum dan reputasi akibat penggunaan alat yang tidak mereka pahami.

Kepemimpinan institusional mencakup kesediaan menempatkan kepentingan jangka panjang di atas keuntungan komunikasi jangka pendek. Serangan viral dapat memberi keuntungan sesaat, tetapi melemahkan kepercayaan pada proses yang kelak dibutuhkan oleh semua peserta. Kesepakatan lintas partai mengenai label konten sintetis, perlindungan data, dan larangan instruksi palsu untuk memilih dapat membangun batas bersama. Aturan perilaku demikian perlu disertai pemantauan dan mekanisme pelaporan agar tidak menjadi deklarasi simbolik. Ketika kompetitor mematuhi standar yang sama, ruang kompetisi tetap hidup sementara praktik manipulatif kehilangan legitimasi.

Glossarium

AI generatif — Sistem AI yang menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, atau video berdasarkan pola yang dipelajari dari data.

Algoritma — Urutan aturan atau prosedur komputasional untuk mengolah masukan dan menghasilkan keluaran.

Amplifikasi algoritmik — Peningkatan jangkauan atau visibilitas konten melalui keputusan pemeringkatan dan rekomendasi otomatis.

Audit algoritmik — Pemeriksaan sistematis atas tujuan, data, proses, kinerja, dampak, dan akuntabilitas suatu sistem algoritmik.

Deepfake — Media sintetis atau manipulatif yang meniru rupa, suara, atau gerak orang nyata dengan bantuan teknik AI.

Disinformasi — Informasi salah atau menyesatkan yang diproduksi atau disebarkan dengan maksud menipu.

Misinformasi — Informasi keliru yang beredar tanpa kepastian bahwa penyebarnya bermaksud menipu.

Malinformasi — Informasi autentik yang digunakan atau disebarkan dalam konteks yang merugikan, termasuk pelanggaran privasi.

Microtargeting politik — Penargetan pesan politik kepada segmen audiens sempit berdasarkan data atau karakteristik tertentu.

Pemrofilan — Pemrosesan data untuk menilai atau memperkirakan aspek pribadi, preferensi, atau perilaku seseorang.

Propaganda komputasional — Penggunaan otomatisasi, algoritma, data, dan kurasi manusia untuk memengaruhi percakapan atau opini publik.

Sistem rekomendasi — Sistem yang menyarankan atau memeringkat konten berdasarkan perkiraan relevansi bagi pengguna.

Kendali manusia bermakna — Pengawasan manusia yang memiliki kompetensi, waktu, informasi, dan kewenangan nyata untuk meninjau atau menolak keluaran AI.

Provenans konten — Informasi tentang asal-usul, pembuat, perubahan, dan riwayat suatu konten digital.

Liar's dividend — Keuntungan politik yang diperoleh ketika seseorang dapat menyangkal bukti autentik dengan mengklaim bukti itu hasil manipulasi AI.

Integritas pemilu — Kondisi ketika seluruh proses pemilu berlangsung sesuai hukum, adil, transparan, aman, dan dapat dipercaya.

Penilaian dampak algoritmik — Kajian sebelum atau selama penggunaan untuk mengidentifikasi risiko, kelompok terdampak, manfaat, serta mitigasi sistem AI.

Keterjelasan atau explainability — Kemampuan memberikan penjelasan yang dapat dipahami tentang cara sistem menghasilkan keluaran atau memengaruhi keputusan.

Kesetaraan politik — Prinsip bahwa warga memiliki kedudukan dan hak politik yang setara dalam proses demokratis.

Literasi media dan AI — Kemampuan memahami, mengevaluasi, memverifikasi, serta menggunakan informasi dan sistem AI secara kritis.

Daftar Pustaka

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211

Busuioc, M. (2021). Accountable artificial intelligence: Holding algorithms to account. *Public Administration Review*, 81(5), 825–836. https://doi.org/10.1111/puar.13293

Diakopoulos, N. (2015). Algorithmic accountability: Journalistic investigation of computational power structures. *Digital Journalism*, 3(3), 398–415. https://doi.org/10.1080/21670811.2014.976411

Huszár, F., Ktena, S. I., O'Brien, C., Belli, L., Schlaikjer, A., & Hardt, M. (2022). Algorithmic amplification of politics on Twitter. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(1), e2025334119. https://doi.org/10.1073/pnas.2025334119

Jalli, N., & Wihardja, M. M. (2024, June 25). Election integrity in the age of artificial intelligence: Lessons from Indonesia. Fulcrum. https://fulcrum.sg/article/commentaries/election-integrity-in-the-age-of-artificial-intelligence-lessons-from-indonesia/

Kitchin, R. (2017). Thinking critically about and researching algorithms. *Information, Communication & Society*, 20(1), 14–29. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1154087

Levy, K., Chasalow, K. E., & Riley, S. (2021). Algorithms and decision-making in the public sector. *Annual Review of Law and Social Science*, 17, 309–334. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-041221-023808

Pawelec, M. (2024). On the way to deep fake democracy? Deep fakes in election campaigns in 2023. *European Political Science*, 23, 454–473. https://doi.org/10.1057/s41304-024-00482-9

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Subekti, D., Yusuf, M., Saadah, M., & Wahid, M. (2025). Social media and disinformation for candidates: The evidence in the 2024 Indonesian presidential election. *Frontiers in Political Science*, 7, Article 1625535. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1625535

Tucker, J. A., Guess, A., Barbera, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., Stukal, D., & Nyhan, B. (2018). Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature. *Political Science*, 21, 1–40. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050916-041037

Woolley, S. C., & Howard, P. N. (2016). Automation, algorithms, and politics: Political communication, computational propaganda, and autonomous agents—Introduction. *International Journal of Communication*, 10, 4882–4890. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6298